Pemerintah Daerah
Kabupaten Manggarai Barat

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

kominfo@manggaraibaratkab.go.id
https://kominfo.manggaraibaratkab.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat tahun 2024. LKIP merupakan dokumen yang menjadi salah satu komponen dari siklus akuntabilitas yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan penyusunan LKIP. LKIP yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 – 2026 serta dokumen Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 ini, adalah perwujudan akuntabilitas kinerja yang tercermin dari hasil pencapaian kinerja sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sebagai salah satu dokumen evaluasi kinerja, melalui LKIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan dan program, sehingga dalam perumusan kebijakan dan program ke depannya dapat lebih tepat sasaran dan implementatif. Selain itu, melalui LKIP ini akan dapat dicermati kendala yang ada dalam mengimplementasikan program dan kegiatan, mengetahui penyebab kegagalan sekaligus merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Meskipun di tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika cukup banyak mencapai target, namun kami tetap berharap, Laporan Kinerja Dinas Kominfo tahun 2024 ini, akan mendapatkan umpan balik dari masyarakat, menumbuhkan partisipasi masyarakat secara luas bagi peningkatan kinerja seluruh unit kerja di lingkup Dinas Kominfo Kabupaten Manggarai Barat. Masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan pembangunan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian kedepan.

Labuan Bajo, 15 Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Manggarai Barat

Paulus Setahu, S. Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 196806292000121004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
IKHTISAR EKSEKUTIF ..... **vi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud & Tujuan 2
1.3. Struktur Organisasi 3
1.4. Tugas dan Fungsi 5
1. Tugas Pokok 5
2. Fungsi 5
1.5. Permasalahan dan Isu Strategis 6
1.6. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA **9**
2.1. Rencana Strategis 2021 - 2026 9
2.1.1. Visi 10
2.1.2. Misi 11
2.1.3. Tujuan & Sasaran 12
2.1.4. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 12
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023 - 2026 15
2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **18**
3.1. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 19
3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 20
3.1.2. Analisis Capaian Kinerja 21
3.2. Realisasi Anggaran 66
BAB IV PENUTUP **74**
4.1. KESIMPULAN 74
4.2. SARAN 75

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Bagan Struktur Organisasi 4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pemetaan permasalahan dan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat 6
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 12
Tabel 2. 2 Daftar program, kegiatan dan sub kegiatan serta jumlah anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 13
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) 16
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 17
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 19
Tabel 3. 2 Intepretasi atas pencapaian sasaran 20
Tabel 3. 3 Target dan Realisasi Pengukuran Kinerja Tahun 2024 20
Tabel 3. 4 Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024..... 21
Tabel 3. 5 Daftar Layanan Publik Secara Online dan terintegrasi di Kabupaten Manggarai Barat 27
Tabel 3. 6 Daftar OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 29
Tabel 3. 7 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024, 2023, 2022 dan 2021 31
Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Target Renstra Tahun 2021 - 2026 33
Tabel 3. 9 Aspek penilaian SPBE tahun 2024 34
Tabel 3. 10 Daftar nama aplikasi layanan publik secara online dan terintegrasi 34
Tabel 3. 11 Daftar OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 36
Tabel 3. 12 Perbandingan realisasi indikator kinerja Tahun 2024 dengan target nasional 37
Tabel 3. 13 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian indikator kinerja 41
Tabel 3. 14 Perhitungan efisiensi Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 41
Tabel 3. 15 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis 45

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 3. 16 Daftar aplikasi Layanan publik yang terintegrasi tahun 2024 47
Tabel 3. 17 Daftar aplikasi layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi tahun 2024 48
Tabel 3. 18 Daftar aplikasi untuk penyelenggaraan e-government Pemda Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 49
Tabel 3. 19 Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akses internet untuk penyelenggaraan e-government tahun 2024 50
Tabel 3. 20 Daftar diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) Tahun 2024 53
Tabel 3. 21 Daftar komunitas masyarakat/mitra komunikasi Pemda Kabupaten Manggarai Barat 59
Tabel 3. 22 Daftar OPD yang menyajikan data statistik sektoral lengkap tahun 2024 62
Tabel 3. 23 Daftar Aplikasi persandian yang diterapkan dalam aplikasi SPBE... 64
Tabel 3. 24 Daftar capaian kinerja kegiatan penunjang sasaran strategis Perangkat Daerah 65
Tabel 3. 25 Analisis Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024 67
Tabel 4. 1 Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 74

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 menyajikan informasi capaian kinerja, sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026.

Hasil capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan secara umum cukup dari yang ditargetkan. Rata-rata capaian sasaran strategis tersebut adalah 107,50%. Total anggaran untuk melaksanakan sasaran strategis tahun 2024 adalah sebesar Rp. **4.548.349.733,-** dan dilakukan perubahan pada APBD-P menjadi Rp. **4.440.171.033**,- dengan serapan sebesar Rp. **3.911.325.676**,- atau 88,09%. Capaian kinerja sasaran dan capaian realisasi anggaran tersebut menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang harus dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika. Rata-rata capaian kinerja berdasarkan indikator yang ditetapkan menunjukkan presentase capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
1.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,35 Indeks	3,47	103,58%	Sangat Baik (A)
		Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	75%	85,71%	114,28%	Sangat Baik (A)
		Persentase perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan	60%	60,47%	100,77%	Sangat Baik (A)
Rata – rata capaian indikator kinerja					106,21%	Sangat Baik (A)

Jika dilihat dari rata-rata persentase capaian indikator kinerja diatas, maka dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 adalah **Sangat Baik.** Namun dari hasil interpretasi sangat baik tersebut, masih terdapat beberapa hambatan/kendala yang dihadapi dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024, secara garis besar dapat kami jelaskan sebagai berikut:

A. Internal:

1. Terbatasnya jumlah SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat yang menguasai bidang Teknologi Informasi, statistik dan persandian untuk penyelenggaraan pemerintahan;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat untuk menyelenggarakan teknologi informasi Komunikasi atau *Information and Communication of Technology (ICT);*
3. Terbatasnya kemampuan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2024 baik untuk kegiatan pembangunan baru maupun untuk rehabilitasi/perawatan sarana prasarana Komunikasi dan informatika yang ada;
4. Belum tersedianya Dokumen Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Rasionalisasi anggaran di beberapa sub kegiatan sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan harus mengalami *refocussing* anggaran yang cukup besar.
6. Kurangnya koordinasi internal aparatur dalam pelaksanaan tugas.

B. Eksternal

1. Infrastruktur telekomunikasi di wilayah perdesaan yang masih kurang memadai untuk menunjang pelayanan publik secara online di wilayah perdesaan;
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat Manggarai Barat dalam mendiseminasikan informasi diseluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat;
3. Pemahaman aparatur pada masing-masing OPD tentang penyedian data statistik sektoral yang masih rendah.
4. Masih Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan teknologi IT untuk pelayanan publik secara online;

C. Upaya Penanganan Masalah

1. Meningkatkan kompetensi SDM Dinas Komunikas dan Informatika pada bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, statistik dan persandian melalui pelatihan dan pendidikan teknis;
2. Mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membantu pembangunan akses telekomunikasi dan akses internet untuk masyarakat pedesaan Manggarai Barat;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Menyusun beberapa regulasi yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik online untuk melakukan sosialisasi pelayanan kepada masyarakat;
5. Memaksimalkan aparatur yang ada untuk lebih meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan disiplin serta meningkatkan koordinasi internal dalam pelaksanaan tugas;
6. Meninjau kembali kebijakan internal SPBE dan menerbitkan kebijakan internal SPBE baru yang sesuai dengan peraturan perundang-undanangan yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan *good governance* (pemerintahan yang baik) merupakan harapan dan keinginan seluruh masyarakat, baik itu penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat pusat maupun pemerintah daerah. Menurut para ahli ilmu pemerintahan, bahwa salah satu syarat membangun pemerintahan yang baik yaitu mengimplementasikan akuntabilitas publik terhadap penyelenggaraan anggaran negara. Implementasi akuntabilitas publik diyakini dapat mengubah penyelenggaraan pemerintah yang tidak berorientasi pelayanan publik dan korup menuju pemerintahan yang demokratis. Manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab pasti akan memiliki dukungan publik. Publik mempercayai apa yang diatur, direncanakan dan dilaksanakan dengan program-program yang berorientasi kepentingan publik. Tanggungjawab penyelenggara pemerintahan mencerminkan kewajiban pemerintah untuk melayani warga negara.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja pada urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Penyusunan LKIP ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan terbaru adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat;
2. Mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat didalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Maksud & Tujuan

1. Maksud

   Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban tentang tingkat akuntabilitas kinerja penggunaan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat pada Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian target Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati.

2. Tujuan

   Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

   1) Untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada dokumen perjanjian kerja;
   2) Memberikan gambaran secara jelas, transparan, dan akuntabel tentang keberhasilan/kegagalan Penyelenggaraan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pencapaian tujuan pada tahun anggaran 2024;
   3) Sebagai bahan evaluasi penyusunan rencana kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun berikutnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 167) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor : 65 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Oragnisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat, maka urusan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian menjadi urusan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut di atas. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian;
   a. Sub Bagian Keuangan;
   b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
4. Bidang Layanan Tata Kelola Aplikasi Informatika;
5. Bidang Data dan Statistik Sektoral;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. Masing-masing bidang membawahi kelompok jabatan fungsional.

Gambar 1.1 dibawah ini menyajikan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

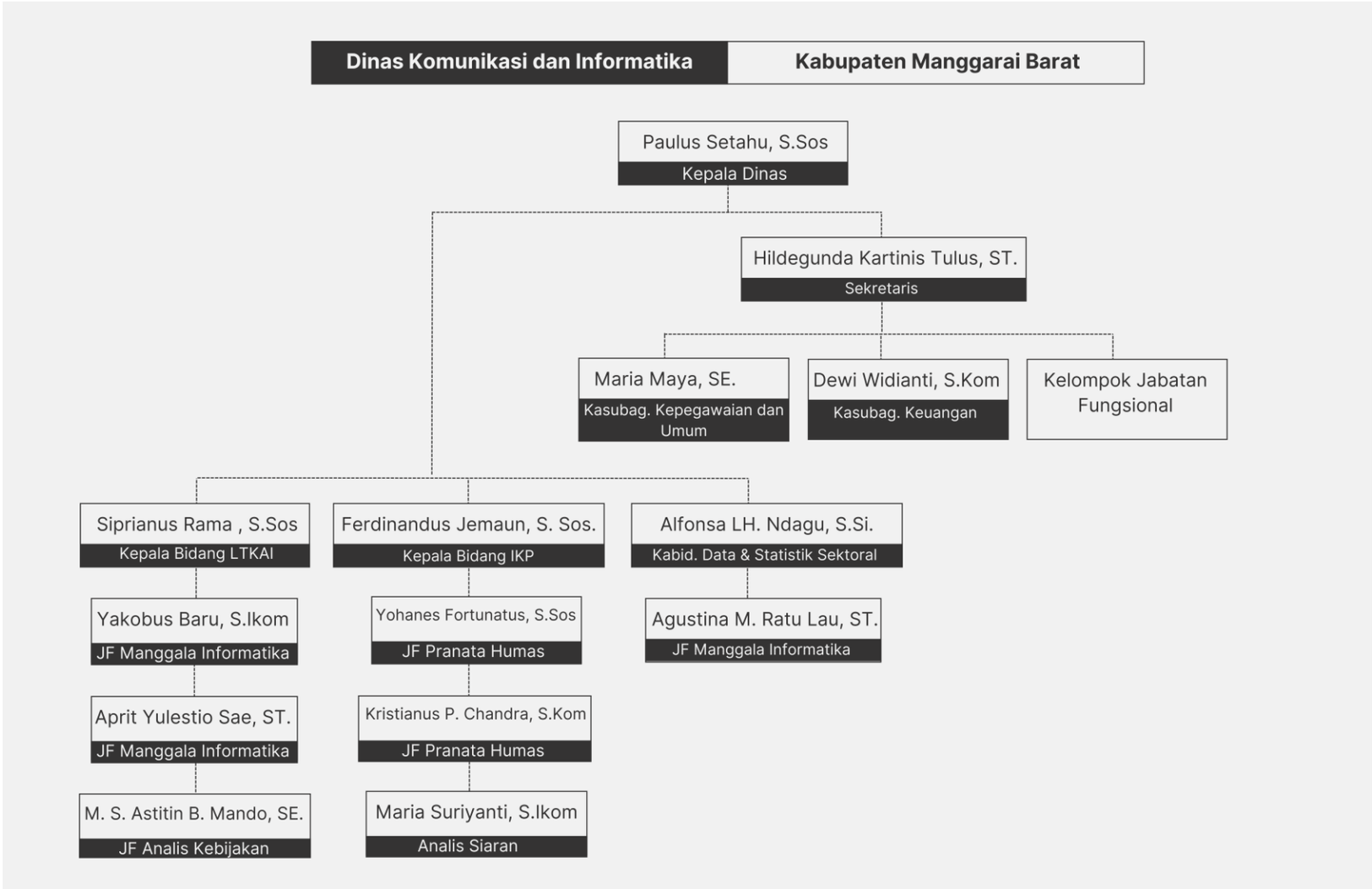

Gambar 1. 1. Bagan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1.4. Tugas dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat dalam melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan urusan Persandian diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat, adapun tugas dan fungsi dimaksud adalah sebagai berikut:

- **Tugas Pokok**

  Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintah bidang Persandian dan urusan pemerintah bidang Statistik.

- **Fungsi**

  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam tugas pokok diatas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan fungsi:

  1. penyelenggaraan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah;
  2. penyelenggaraan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah;
  3. penyelenggaraan pengelolaan e-govemment lingkup pemerintah daerah;
  4. penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah;
  5. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
  6. penyelenggaraan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
  7. penyelenggaraan pelaksanaan administrasi dinas;
  8. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian jabatan fungsional;
  9. pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan
  10. pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1.5. Permasalahan dan Isu Strategis

Sesuai urusan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika pada bidang urusan Komunikasi dan Informatika, urusan statistik dan urusan Persandian merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam memberikan pelayanan yang kapabel kepada masyarakat serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital baik untuk proses pembangunan maupun untuk proses peningkatan perekonomian masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital untuk pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah hal yang sejalan dengan komitmen pemerintah terkait dengan pembangunan E-Government sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pemetaan permasalahan pelayanan E-Government. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika banyak menghadapi permasalahan – permasalahan strategis yang kami petakan seperti yang disajikan dalam tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1. 1
Pemetaan permasalahan dan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat

No.	Masalah Pokok	Masalah	Upaya Pemecahan Masalah
1.	Ketersediaan Akses telekomunikasi dan internet diwilayah perdesaan yang masih sangat minim	Masih Kurangnya pembangunan Menara telekomunikasi diwilayah perdesaan untuk memfasilitasi ketersediaan jaringan telekomunikasi dan akses internet	▪ Perlu koordinasi yang baik dengan stakeholder pengembang Menara telekomunikasi serta berkoordinasi dengan Bakti Kemenkominfo untuk pembangunan Menara telekomunikasi di wilayah perdesaan dan peningkatan Bandwith pada Menara existing ▪ Perlunya Koordinasi dengan Kementerian Komdigi untuk penyediaan Akses Internet pada fasilitas umum dan penambahan Bandwith pada fasilitas umum yang telah memiliki Akses Internet bantuan BAKTI Komdigi
2.	Indeks Keamanan informasi masih rendah	▪ Pemenuhan variabel keamanan informasi belum terlaksana dengan baik.	▪ Perlunya peningkatan pengetahuan aparatur pada masing-masing OPD untuk mengamankan informasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Masalah Pokok	Masalah	Upaya Pemecahan Masalah
		▪ Belum tersedianya pedoman keamanan informasi Pemda Kabupaten Manggarai Barat ▪ Audit Keamanan masih dilakukan internal	melalui proses pendidikan dan pelatihan; ▪ Perlu penyusunan pedoman teknis tentang tata kelola keamanan informasi ▪ Perlu penyediaan SDM Dinas Kominfo sebagai tenaga teknis untuk pengamanan informasi ▪ Audit Keamanan dilakukan oleh Latik (external)
3.	Pemanfaatan teknologi digital untuk pemberdayaan masyarakat yang belum optimal	Masih kurangnya ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi untuk pemanfaatan teknologi digital untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat	▪ Perlu peningkatan pendidikan dan pelatihan SDM Dinas Kominfo untuk pemanfaatan teknologi digital ▪ Perlu meningkatkan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan pelatihan masyarakat tentang pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan perekonomian.
4.	Pengelolaan PPID yang belum optimal	Masih Kurangnya SDM yang memahami pengelolaan PPID di masing – masing OPD	▪ Peningkatan pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk PPID pembantu pada masing-masing OPD ▪ Peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID Kabupaten Manggarai Barat pada Dinas Kominfo
5..	Pengelolaan e-lapor melalui SP4N LAPOR! yang belum optimal	▪ Belum Optimalnya publikasi penggunaan e-lapor ▪ Belum Optimalnya pemanfaatan dan integrasi pengaduan ke aplikasi e-lapor Tingkat OPD	▪ Publikasi dilakukan melalui media online, pelatihan bagi kaum muda, tokoh agama dan tokoh Masyarakat. ▪ Peningkatan kapasitas SDM pengelola SP4N LAPOR! Kabupaten Manggarai Barat pada Dinas Kominfo
5.	Masih rendahnya pemanfaatan data statistik sektoral	▪ Kurangnya pemahaman OPD terhadap pentingnya data statistik sektoral dalam perencanaan ▪ Belum adanya regulasi sebagai acuan dalam pemanfaatannya	▪ Peningkatan pemahaman OPD tentang pemanfaatan data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan melalui pendidikan dan pelatihan aparatur pada masing-masing OPD ▪ Perlunya penyusunan pedoman pengelolaan data statistik sektoral Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Kominfo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1.6. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penyajian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika berpedoman pada Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Struktur Organisasi
- 1.4 Tugas dan Fungsi
- 1.5 Permasalahan dan Isu Strategis
- 1.6 Sistematika Penyajian

BAB II . PERENCANAAN KINERJA
- 2.1 Rencana Strategis Perubahan 2021-2026
- 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) 2022-2026
- 2.3 Perjanjian Kinerja 2024

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
- 3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV.PENUTUP
- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2021 - 2026

Disamping tugas pokok dan fungsi yang telah disusun sebagai acuan/pedoman pelaksanaan tugas, maka disusun pula rencana strategis tahunan (RENSTRA) tahun 2021-2026 (Renstra Perubahan 2022-2026) sebagai tolok ukur pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 s/d 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Pada prinsipnya Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dan atau pelaksanaan dari Kebijaksanaan dan Program Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebagai landasan dan pedoman bagi seluruh jajaran aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat dalam melaksanakan tugas - tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Seperti yang tertuang dalam RPJMD Perubahan 2021-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas utama sebagai pendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan penyebarluasan informasi, maka perlu adanya upaya terus menerus untuk meningkatkan kehandalan penyelenggaraan pelayanan publik dan penyebarluasan informasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan media massa. Salah satu upaya tersebut adalah mengintegrasikan pelayanan publik yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat agar lebih efektif dan efisien. Dalam mewujudkan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menggunakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati seperti yang telah dirumuskan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.1.1.Visi

Visi :

"MABAR BANGKIT MENUJU MABAR MANTAP".

Makna dari Visi ini dijabarkan sebagai berikut:

1. **Mabar Bangkit**, bagi masyarakat Indonesia, istilah atau kata "Bangkit" mengandung makna filosofis dan historis yang mendalam. Ketika Bangsa Indonesia berjuang melawan penindasan dan penjajahan, para pahlawan sepakat untuk bersatu dan bangkit melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Dalam Konteks Visi tersebut, kata "Bangkit" dimaknai sebagai berikut:
   - **Bangkit** merupakan seruan dan ajakan untuk membangun kebulatan tekad bersama masyarakat Manggarai Barat untuk *"bangun dari tidurnya"* dan berjuang bersama melawan berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, ketertinggalan dalam kualitas pendidikan, ketertinggalan dalam jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pembangunan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi pertanian.
   - **Bangkit** juga dimaknai sebagai suatu tindakan aktif untuk bergegas dari situasi yang ada menuju situasi baru yang lebih baik. Bangkit juga sebuah ajakan bersama yang diharapkan akan menggugah semangat seluruh komponen masyarakat Manggarai Barat untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan **semangat restorasi.** Semangat restorasi diharapkan membawa kerja keras seluruh komponen untuk mengejar ketertinggalan Kabupaten Manggarai Barat dalam berbagai dimensi pembangunan.
2. **MANTAP** merupakan singkatan dari Maju, Unggul, Tangguh dan Populer.
   - **Mabar Mantap** mengandung pengertian sebuah sikap hati/keyakinan bersama dan optimisme untuk menjadikan Kabupaten Manggarai Barat sebagai daerah yang Maju, Unggul, Tangguh, dan Populer. Pembangunan daerah difokuskan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar serta tersedianya sarana dan prasarana dasar yang merata, berkualitas dan memadai.

- **Mabar Mantap** juga bermakna terwujudnya kualitas SDM yang produktif, mandiri, dinamis, kreatif dan inovatif, jujur, beretika dan berintegritas, sehingga mampu bersaing secara kompetitif dan komparatif di berbagai bidang kehidupan. Melalui Mabar Mantap, prioritas pembangunan akan diarahkan berdasarkan potensi daerah setempat melalui pemberdayaan masyarakat dengan menghubungkan berbagai aspek pembangunan sehingga mampu mandiri dan menghasilkan produksi yang bernilai ekonomis dan mampu bersaing untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pada sektor pariwisata dan pertanian.
- **Mabar Mantap** juga memberi arti bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan sepenuhnya berpihak pada seluruh lapisan masyarakat Manggarai Barat.

2.1.2.Misi

Visi "Mabar Bangkit menuju Mabar Mantap", menunjukkan tekad, semangat dan optimisme bersama seluruh masyarakat Manggarai Barat menuju perubahan ke arah yang lebih baik dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki daerah guna mewujudkan perbaikan-perbaikan dalam setiap dimensi pembangunan untuk **Masyarakat Manggarai Barat Yang Maju, Unggul, Tangguh Dan Populer**. Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Manggarai Barat tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan pariwisata secara Berkelanjutan dan Inklusif sebagai Pengerak Utama Ekonomi;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
3. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal;
4. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian Lingkungan;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026, maka Dinas Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan misi ke 5 (lima) sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat.

2.1.3.Tujuan & Sasaran

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki peran strategis dalam urusan komunikasi dan informatika; urusan statistik dan urusan persandian, dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Manggarai Barat yaitu “Mabar Bangkit menuju Mabar Mantap” sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026.

Sebagai penunjang pembangunan dalam jangka menengah, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tanggung jawab yang besar dalam Misi 5 yaitu ”Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, dan melayani” pada RPJMD 2021-2026, Tujuan RPJMD ini adalah : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dinamis, sehingga diturunkan pada sasaran jangka menengah yang dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 – 2026 adalah “Terwujudnya birokrasi yang kapabel”. Pada tabel 2.1 dibawah ini kami sajikan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	
1	2	3	
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dinamis	1.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel

2.1.4.Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat menjalankan 4 program, 11 kegiatan dan 29 sub kegiatan yang dibagi ke dalam 4 bidang yaitu Bidang sekretariat, Bidang Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan Bidang Data dan Statistik Sektoral.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Adapun daftar program, kegiatan dan sub kegiatan yang dimaksud adalah seperti yang disajikan pada tabel 2.2. berikut ini.

Tabel 2. 2

Daftar program, kegiatan dan sub kegiatan serta jumlah anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

No.	Kategori	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
I.	**Program**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.724.911.233**
1.	**Kegiatan**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12.996.600**
(1).	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.900.000
(2).	Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.096.600
2.	**Kegiatan**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.414.138.133**
(1).	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.219.886.373
(2).	Sub Kegiatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	191.742.460
(3).	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.509.300
3.	**Kegiatan**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**19.367.400**
(1).	Sub Kegiatan	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.367.400
4.	**Kegiatan**	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**-**
(1).	Sub Kegiatan	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-
5.	**Kegiatan**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**575.600**
(1).	Sub Kegiatan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	575.600
6.	**Kegiatan**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**163.441.500**
(1).	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.183.400
(2).	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.021.700
(3).	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.059.700
(4).	Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.090.200
(5).	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan/Material	9.921.000
(6).	Sub Kegiatan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-
(7).	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.068.300
(8).	Sub Kegiatan	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.097.200

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Kategori	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
7.	**Kegiatan**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**
(1).	Sub Kegiatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-
(2).	Sub Kegiatan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-
8.	**Kegiatan**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**44.492.000**
(1).	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.492.000
(2).	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.000.000
9.	**Kegiatan**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**69.900.000**
(1).	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.500.000
(2).	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.400.000
II.	**Program**	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**119.789.600**
1.	**Kegiatan**	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**119.789.600**
(1).	Sub Kegiatan	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	8.820.000
(2).	Sub Kegiatan	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	-
(3).	Sub Kegiatan	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	38.936.800
(4).	Sub Kegiatan	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	-
(5).	Sub Kegiatan	Pelayanan Informasi Publik	-
(6).	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	72.032.800
III.	**Program**	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**1.537.835.400**
1.	**Kegiatan**	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**1.537.835.400**
(1).	Sub Kegiatan	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.379.462.900
(2).	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	39.935.200
(3).	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	48.000.000
(4).	Sub Kegiatan	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	51.050.000
(5).	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	-
(6).	Sub Kegiatan	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	19.387.300
(7).	Sub Kegiatan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	27.066.900

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Kategori	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
IV.	**Program**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**57.634.800**
1.	**Kegiatan**	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**57.634.800**
(1).	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	30.248.400
(2).	Sub Kegiatan	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	16.863.800
(3).	Sub Kegiatan	Membangun Metadata Statistik Sektoral	10.522.600
V.	**Program**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**-**
1.	**Kegiatan**	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**-**
(1).	Sub Kegiatan	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-
		Total	**4.440.171.033**

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021 - 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penyempurnaan kembali IKU tersebut setelah RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator–indikator kinerja yang ada dalam Program kegiatan yang dijalankan tahun anggaran 2021-2026 yang memiliki *focus stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat yang akan digunakan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 02/KEP/HK/2019 tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2. 3
Indikator Kinerja Utama (IKU)

	Misi	Tujuan	Sasaran		No IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
									2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
VISI: MABAR BANGKIT MENUJU MABAR MANTAP															
	Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, dan melayani	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dinamis	2	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,15	2,75	2,75	3,05	3,35	3,65	3,95	3,95

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan capain kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur capaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja/Sasaran pada Tahun 2024
1.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,35 Indeks
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	75%
		Persentase perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan	60%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan kontrak kinerja yang telah ditetapkan dan ditandatangai pada Tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan *stakeholder* Kabupaten Manggarai Barat (Pemda dan DPRD Kabupaten Manggarai Barat) atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan/kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 dilaporkan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat selama Tahun 2024. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Nomor	Interval Nilai realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≥	Sangat Tinggi
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010

3.1. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksananaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Kabupaten Manggarai Barat, seperti yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026.

Untuk melihat keberhasilan atau kegagalan kinerja pemerintah, maka dapat dilihat capaian atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026 dapat diukur dengan melihat realisasi dari target indikator yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024. Kerangka Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{Realisasi}{Rencana} x\ 100\ \%$$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{Realisasi - (Realisasi - Rencana)}{Rencana} x\ 100\ \%$$

Tabel 3. 2
Intepretasi atas pencapaian sasaran

No	Rentang capaian	Interprestasi
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik (A)
2	Lebih dari 76% s/d 100%	Baik (B)
3	56% s/d 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 dan tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024. Pencapaian masing – masing sasaran terhadap target yang direncanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3. 3
Target dan Realisasi Pengukuran Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,35	3,47	103,58%
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	75	85,71	114,28%
		Persentase perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan	%	60	60,47	100,77%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3.1.2.Analisis Capaian Kinerja

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui dokumen Penetapan Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasi yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Selanjutnya, atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat dan penyebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan 3 urusan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian dengan 4 program dan 11 kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023;

Tabel 3. 4
Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,35 Indeks	3,47 Indeks	103,58 %
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	75 %	85,71%	114,28%
		Persentase perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan Pembangunan	60 %	60,47%	100,77%

Agar tercapainya sasaran strategis "**Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel",** maka Dinas Komunikasi dan Informatika mengukur sasaran strategis tersebut menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.4 diatas:

1) **Indikator Kinerja "Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)".**

Berdasarkan realisasi yang disajikan pada Tabel 3.4 terlihat bahwa pada tahun 2024 indikator "Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Manggarai Barat",

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

ditargetkan 3,35 indeks dan realisasinya adalah 3,47 indeks, maka realisasi capaian kinerja ini melebihi target yang telah ditetapkan dan jika dipersentasekan tingkat capaian tersebut adalah 103,58% dengan Penilaian Realisasi Peringkat Kinerja **Sangat Tinggi**, dan interpertasi Sangat Baik (A), hal ini didukung oleh:

- Penurunan nilai dialami pada Domain Kebijakan SPBE semula nilainya 5,00 menjadi 3,90 di tahun 2024. Domain Kebijakan ini menurun karena Tingkat kematangan 5 diperoleh bila hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal SPBE Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru, sedangkan hasil evaluasi internal, kebikan internal sudah sesuai sehingga tidak perlu membuat kebijakan baru. Kebijakan yang akan dibuat adalah tururunan dari kebijakan yang ada.
- Peningkatan nilai pada Domain Tata Kelola SPBE, dimana nilai tahun 2023 adalah 2,70 menjadi 3,10 pada tahun 2024. Domain ini terdiri dari tiga aspek yaitu Perencanaan Strategis, Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Penyelenggara SPBE. Pada Domain ini yang perlu diperhatikan agar nilai untuk tahun yang akan datang bertambah adalah aspek Perencanaan Strategis SPBE dan aspek Teknologi Informasi khusunya indikator Arsitektur SPBE Tingkat kematangan 3 diperoleh karena Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah memanfaatkan Aplikasi SIA SPBE (Sistem Informasi Arsitektur SPBE) yakni *as-is, to-be* dan peta renacana. Seangkan Inovasi Proses Bisnis SPBE masih pada Tingkat kematangan 1.
- Peningkatan juga terjadi pada Domain Manajemen SPBE, dengan nilai 2,64 pada tahun 2023 sementara pada 2024 2,73. Domain ini mememliki dua aspek yaitu Penerapan Manajemen SPBE. Penerapan Manajeman khususnya Manejemen Pengetahuan telah menggunakan sistem aplikasi yakni https://mp-spbe.manggaraibaratkab.go.id/. Sedangkan Audit TIK tahun 2024 nilai tingkat kematangannya adalah 3,00 hal ini diperoleh dari pelaksanaan audit TIK tahun 2024 menggunakan *Tools* dari BRIN(Web audit).
- Peningkatan Nilai pada Domain Layanan SPBE dari 3,70 menjadi 3,82. Domain ini terdiri dari dua aspek yaitu Layanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Administrasi Pemerintahan berbasis elektronik dan Layanan Publik berbasis elektronik. Untuk Layanan administrasi semula dengan nilai 3,50 meningkat sedikit menjadi 3,70. Sedangkan untuk layanan Publik mampu dipertahankan pada indeks 4,00.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2023 bahwa Nilai Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuania-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 26 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
NIP. 197208081996032001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	**13%**
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	**25%**
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	**16,5%**
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	**45,5%**
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik	18%

Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	**3,12**	4,03	**3,82**	**3,37**	**3,42**	**2,45**	**3,39**
Domain Kebijakan	3,36	**4,28**	**4,01**	**3,61**	**3,61**	**2,51**	**3,64**
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	**2,62**	**3,92**	**3,65**	**3,11**	**3,07**	**1,69**	**2,94**
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	**1,86**	**2,87**	**2,61**	**2,31**	**2,17**	**1,13**	**2,03**
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	**3,78**	**4,44**	**4,26**	**3,81**	**3,98**	**3,32**	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	**3,99**
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

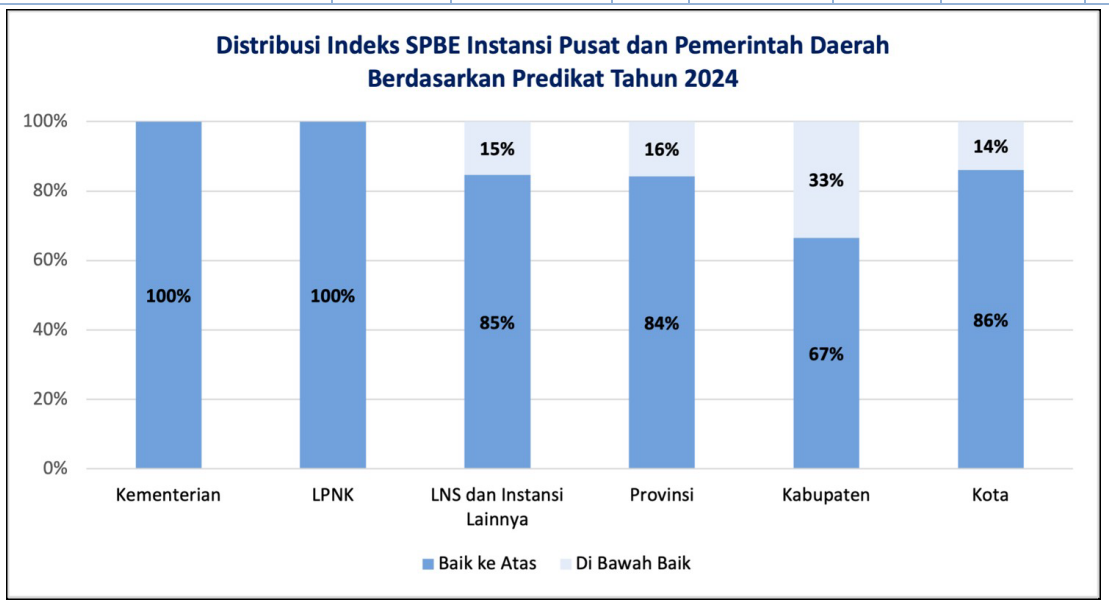

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. MANGGARAI BARAT	3,47 (Baik)

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

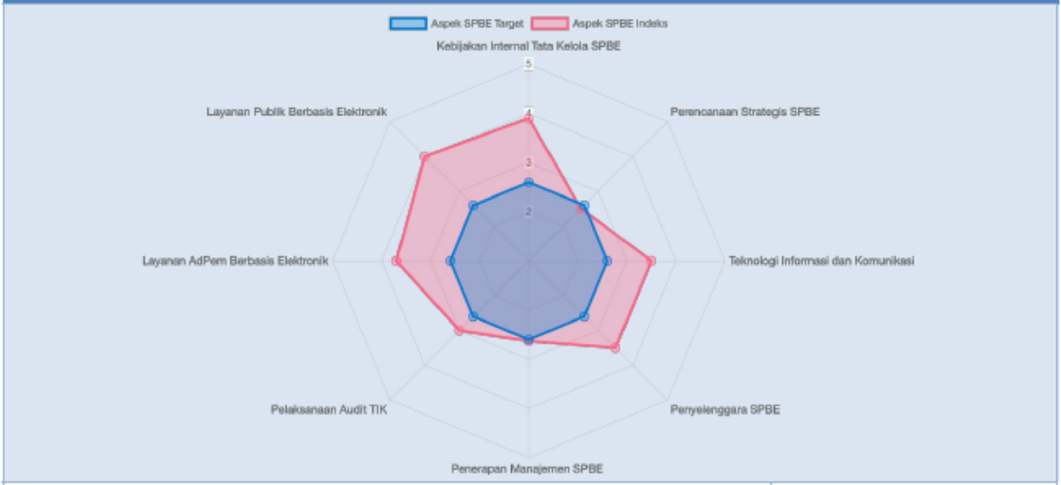

Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	**3,47**
Domain Kebijakan SPBE	3,90
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	*3,90*
Domain Tata Kelola SPBE	3,10
Perencanaan Strategis SPBE	*2,50*
Teknologi Informasi dan Komunikasi	*3,50*
Penyelenggara SPBE	*3,50*
Domain Manajemen SPBE	2,73
Penerapan Manajemen SPBE	*2,63*
Audit TIK	*3,00*
Domain Layanan SPBE	3,82
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	*3,70*
Layanan Publik Berbasis Elektronik	*4,00*

Sementara itu, proses pencapaian indikator kinerja pertama ini didukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dan kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu sub kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik. Adapun realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian indikator kinerja pertama adalah sebesar Rp. 48.750.000,- dari total pagu sebesar Rp. 51.050.000,- atau persentase penyerapan anggaran adalah 95,49%. Dari penggunaan anggaran tersebut terdapat efisiensi sebesar Rp. 2.300.000,-.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2) Indikator Kinerja "Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi".

Seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.4 di atas bahwa capaian kinerja pada indikator kinerja kedua yaitu "Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi" adalah 85,71% atau melebihi dari target 75%. Pencapaian kinerja ini didukung oleh penyediaan jaringan internet yang berkualitas dan upaya dari masing-masing OPD penyelenggara layanan online kepada masyarakat untuk mengintegrasikan pelayanan dimaksud. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengutamakan penggunaan Layanan Publik yang sudah ditetapkan menjadi aplikasi umum. Tabel 3.5 disajikan daftar layanan publik Kabupaten Manggarai Barat secara online dan terintegrasi.

Tabel 3. 5
Daftar Layanan Publik Secara Online dan terintegrasi di Kabupaten Manggarai Barat

No.	Nama Layanan/Alamat Website	Nama Aplikasi	Terintegrasi
1.	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	SP4N LAPOR	Sudah
2.	Layanan Perijinan Non OSS	Mabar Mantap	Sudah
3.	Layanan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (Jdih)	Jdih	Sudah
4.	Layanan Pelayanan Publik	SIPP	Sudah
5.	Layanan Pajak Bumi dan Bangunan	V-Tax	Sudah
6.	Layanan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum - DPRD	Jdih-dprd	Sudah
7.	Layanan Informasi Telekomunikasi	Sistel	Belum
8.	Layanan Kependudukan	SIAK	Sudah
9.	Layanan Perijinan	OSS	Sudah
10.	Layanan Wisata	Wis Mabar	Belum
11.	Layanan Perijinan Khusus Manggarai Barat	Payanan Perijinan Daerah Kabupaten Manggarai Barat	Sudah
12.	Layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	PBB	Sudah
13.	Layanan Informasi Publik	PPID	Sudah
14.	Layanan Data Publik	Satu Data Indonesia Manggarai Barat	Sudah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Terdapat 14 layanan Publik yang ada dan 12 diantaranya sudah terintegrasi. Adapun persentase realisasi dapat dihitung menggunakan rumus dibawah ini:

$$Rumus = \frac{Jumlah\ Layanan\ Publik\ yang\ diselenggarakan\ secara\ online\ dan\ terintegrasi}{Jumlah\ Layanan\ Publik}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{12}{14}\ x\ 100\%$$

$$= 85{,}71\ \%$$

Berdasarkan data tahun sebelumnya bahwa capaian tahun 2024 mengalami peningkatan, dimana capaian tahun 2023 yaitu 84,62% atau meningkat sebesar 1,09%. Layanan publik secara online pada tahun 2024 adalah 14 layanan dan yang sudah terintegrasi adalah 12 layanan. Proses pencapaian indikator kinerja ini yaitu didukung oleh penyelenggaraan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta sub kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam upaya menyelenggarakan program dan kegiatan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika merealisasikan penyerapan anggaran sebesar Rp. 48.750.000,- Dari total pagu subedar Rp. 51.050.000,- atau persentase penyerapan anggaran 95,49%. Dari penggunaan anggaran tersebut terdapat efisiensi sebesar Rp. 2.300.000,- atau 4,51% dari pagu anggaran.

3) Indikator Kinerja "Persentase perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan".

Indikator Kinerja ketiga yaitu "Persentase perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan". Berdasarkan capaian yang ditunjukkan pada tabel 3.4, bahwa indikator kinerja ketiga, terealisasi 62,79% dari target 60%, maka dapat disimpulkan bahwa persentase capaiannya adalah 104,65% dengan interpretasi masuk kategori Sangat Baik (A). Keberhasilan Capaian yang baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

ini diperoleh dari keaktifan perangkat daerah dalam menyajikan data statistik sektoral untuk dikompilasi menjadi data statistik sektoral Kabupaten Manggarai Barat, dimana pada tahun 2023 hanya 24 OPD yang menyajikan data sedangkan tahun 2024 meningkat menjadi 26 OPD, dan juga peningkatan capaian ini juga dikarenakan Dinas Kominfo aktif memberikan pelatihan kepada OPD tentang menyajikan data statistik sektoral berdasarkan tupoksi masing – masing, sehingga PD yang menggunakan data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan dan evaluasi atas hasil kinerja juga mengalami peningkatan. Tabel 3.6 berikut ini adalah daftar OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 3. 6
Daftar OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

NO	Nama OPD	Wajib Data Sektoral	Mengirimkan Data Sektroral
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ya	Ya
2.	Dinas Kesehatan	Ya	Ya
3.	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	Ya	Ya
4.	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ya	Ya
5.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Ya	Ya
6.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	Ya	Ya
7.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ya	Ya
8.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Ya	Ya
9.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ya	Ya
10.	Dinas kependidikan Kepemudaan dan Olahraga	Ya	Ya
11.	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	Ya	Ya
12.	Satuan Polisi Pamong Praja	Ya	Tidak
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Ya	Ya
14.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Ya	Ya
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ya	Ya
16.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Ya	Ya
17.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	Ya	Ya
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ya	Ya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	Nama OPD	Wajib Data Sektoral	Mengirimkan Data Sektroral
19.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ya	Ya
20.	Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat	Ya	Ya
21.	Dinas Perhubungan	Ya	Ya
22.	Sekretariat DPRD	Ya	Ya
23.	Sekretariat Daerah	Ya	Tidak
24.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Ya	Ya
25.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ya	Ya
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ya	Tidak
27.	Badan Pendapatan Daerah	Ya	Ya
28.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ya	Tidak
29.	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	Ya	Ya
30.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Ya	Ya
31.	Rumah Sakit Umum Daerah	Ya	Tidak
32.	Kecamatan Komodo	Ya	Tidak
33.	Kecamatan Mbeliling	Ya	Tidak
34.	Kecamatan Sanonggoang	Ya	Tidak
35.	Kecamatan Boleng	Ya	Tidak
36.	Kecamatan Pacar	Ya	Tidak
37.	Kecamatan Macang Pacar	Ya	Tidak
38.	Kecamatan Lembor	Ya	Tidak
39.	Kecamatan Lembor Selatan	Ya	Tidak
40.	Kecamatan Kuwus	Ya	Tidak
41.	Kecamatan Kuwus Barat	Ya	Tidak
42.	Kecamatan Ndoso	Ya	Tidak
43.	Kecamatan Welak	Ya	Tidak

Berikut ini adalah rumus untuk menghitung persentase jumlah OPD yang menyajikan data statistik sektoral berbanding jumlah seluruh OPD Kabupaten Manggarai Barat:

$$Rumus = \frac{Jumlah\ OPD\ yang\ menggunakan\ data\ statistik\ dalam\ melakukan\ evaluasi\ pembangunan\ daerah}{Jumlah\ OPD}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{26}{43}\ x\ 100\%$$

$$= 60{,}47\ \%$$

Proses pencapaian indikator ini diperoleh dengan menjalankan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi.

Dalam upaya menyelenggarakan program dan kegiatan tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika merealisasikan penyerapan anggaran sebesar Rp. 43.778.500,- dari total pagu sebesar Rp. 47.112.200,- atau persentase penyerapan anggaran 92,92%. Dari penggunaan anggaran tersebut terdapat efisiensi sebesar Rp. 3.333.700,-. atau 7,08% dari pagu anggaran.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir;

Dalam rangka untuk mengetahui dan mengevaluasi perkembangan pencapaian indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama tahun RPJMD berjalan, maka berikut ini disajikan realisasi capaian kinerja dimaksud, seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3. 7
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024, 2023, 2022 dan 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,50 Indeks	3,01 Indeks	3,44 Indeks	3,47 Indeks
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	80 %	83,33%	84,62%	85,71%
		Persentase perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan	31,71%	51,22%	55,81%	60,47%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.7 diatas bahwa realisasi indikator kinerja “Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup yaitu sebesar 0.03 indeks jika dibandingkan realisasi tahun 2023, hal ini dikarenakan semakin meningkatnya penilaian indeks aspek SPBE pada tahun 2024. Selanjutnya adalah indikator kinerja “Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi”, pencapaian realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan jika dibandingkan pencapaian pada tahun 2023 yaitu sebesar 1,09%, peningkatkan pencapaian ini didukung oleh penyediaan jaringan internet berkualitas yang semakin massif dan juga upaya dari masing-masing OPD penyelenggara layanan publik online untuk mengintegrasikan pelayanannya. Demikian halnya pada indikator kinerja yang ketiga yaitu indikator kinerja “Persentase perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan”, pencapaian realisasi indikator kinerja ini, pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 4,66%. Pencapaian ini didukung oleh semakin meningkatnya Perangkat Daerah menyajikan data statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Untuk mengetahui dan mengevaluasi realisasi indikator kinerja setiap tahun terhadap target akhir RPJMD, maka dibawah ini dijelaskan realisasi indikator kinerja 2024 terhadap target akhir RPJMD 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 3. 8
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Target Renstra Tahun 2021 - 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD 2026	(%) Capaian terhadap target akhir RPJMD 2026
1.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,47	3,95	87,84
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	85,71	100	85,71
		Persentase perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan	Persen	60,47	80	75,59

1) Indikator Kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Berdasarkan tabel 3.8 dapat dicermati, bahwa realisasi indikator kinerja “Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”, tahun 2024 masih belum mampu mencapai nilai indeks seperti pada target akhir RPJMD/Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar 3,95 indeks atau masih kurang 0,48 indeks. Pencapaian atas indeks SPBE tahun 2024 didukung oleh semakin meningkatnya nilai seluruh aspek penilaian SPBE, adapun aspek penilaian yang dimaksud adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.9 berikut ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 3. 9
Aspek penilaian SPBE tahun 2024

No.	Aspek	Aspek SPBE Target	Aspek SPBE Indeks 2023	Aspek SPBE Indeks 2024
1.	Kebijakan Internal Tata kelola SPBE	2	5,00	3,90
2.	Perencanaan Strategis	2	2,00	2,50
3.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2,75	3,50
4.	Penyelenggara SPBE	2	4,00	3,50
5.	Penerapan Manajemen SPBE	2	2,50	2,73
6.	Audit TIK	2	3,00	3,00
7.	Layanan Adm Pemerintahan Berbasis Elektronik	2	3,50	3,70
8.	Layanan Publik Berbasis Elektronik	2	4,00	4,00

2) Indikator Kinerja Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

Selanjutnya yaitu indikator kinerja “Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi”, seperti yang terlihat pada tabel 3.8, juga dapat dipahami bahwa realisasi indikator kinerja yang kedua ini adalah sebesar 85,71% atau masih kurang sebesar 14,29% dari target akhir RPJMD/Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar 100%. Pencapaian indikator kinerja “Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi” pada tahun 2024 didukung oleh penyediaan akses internet yang berkualitas pada seluruh perangkat daerah dan penyediaan aplikasi layanan umum yang terintegrasi kepada masyarakat, tabel 3.10 dibawah ini yaitu menyajikan daftar layanan publik di Kabupaten Manggarai Barat yang sudah terintegrasi.

Tabel 3. 10
Daftar nama aplikasi layanan publik secara online dan terintegrasi

No.	Nama Layanan/Alamat Website	Nama Aplikasi	Terintegrasi
1.	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	SP4N LAPOR	Sudah
2.	Layanan Perijinan Non OSS	Mabar Mantap	Sudah
3.	Layanan Jaringan DokumentasiInformasi Hukum (Jdih)	Jdih	Sudah
4.	Layanan Pelayanan Publik	SIPP	Sudah
5.	Layanan Pajak Bumi dan Bangunan	V-Tax	Sudah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Nama Layanan/Alamat Website	Nama Aplikasi	Terintegrasi
6.	Layanan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum - DPRD	Jdih-dprd	Sudah
7.	Layanan Informasi Telekomunikasi	Sistel	Belum
8.	Layanan Kependudukan	SIAK	Sudah
9.	Layanan Perijinan	OSS	Sudah
10.	Layanan Wisata	Wis Mabar	Belum
11.	Layanan Perijinan Khusus Manggarai Barat	Payanan Perijinan Daerah Kabupaten Manggarai Barat	Sudah
12.	Layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	PBB	Sudah
13.	Layanan Informasi Publik	PPID	Sudah
14.	Layanan Data Publik	Satu Data Indonesia Manggarai Barat	Sudah

3) Indikator kinerja Persentase perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan

Indikator kinerja ketiga adalah “Persentase perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan”, seperti yang disajikan pada tabel 3.9 terlihat bahwa capaian realisasinya adalah sebesar 60,47%, sedangkan target akhir RPJMD/Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebesar 80% atau selisih sebesar 19,53%. Untuk pencapaian indikator ini didukung oleh keaktifan perangkat daerah dalam menyajikan data statistik sektoral untuk dikompilasi menjadi data statistik sektoral Kabupaten Manggarai Barat serta menggunakannya untuk perencanaan pembangunan, adapun daftar perangkat daerah yang menyajikan dan menggunakan data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan pada bidang urusan masing-masing adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.11 berikut ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 3. 11
Daftar OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

NO	Nama OPD	Wajib Data Sektoral	Mengirimkan Data Sektroral
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ya	Ya
2.	Dinas Kesehatan	Ya	Ya
3.	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	Ya	Ya
4.	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ya	Ya
5.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Ya	Ya
6.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	Ya	Ya
7.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ya	Ya
8.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Ya	Ya
9.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ya	Ya
10.	Dinas kependidikan Kepemudaan dan Olahraga	Ya	Ya
11.	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	Ya	Ya
12.	Satuan Polisi Pamong Praja	Ya	Tidak
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Ya	Ya
14.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Ya	Ya
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ya	Ya
16.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Ya	Ya
17.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	Ya	Ya
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ya	Ya
19.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ya	Ya
20.	Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat	Ya	Ya
21.	Dinas Perhubungan	Ya	Ya
22.	Sekretariat DPRD	Ya	Ya
23.	Sekretariat Daerah	Ya	Tidak
24.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Ya	Ya
25.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ya	Ya
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ya	Tidak
27.	Badan Pendapatan Daerah	Ya	Ya
28.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ya	Tidak
29.	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	Ya	Ya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	Nama OPD	Wajib Data Sektoral	Mengirimkan Data Sektroral
30.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Ya	Ya
31.	Rumah Sakit Umum Daerah	Ya	Tidak
32.	Kecamatan Komodo	Ya	Tidak
33.	Kecamatan Mbeliling	Ya	Tidak
34.	Kecamatan Sanonggoang	Ya	Tidak
35.	Kecamatan Boleng	Ya	Tidak
36.	Kecamatan Pacar	Ya	Tidak
37.	Kecamatan Macang Pacar	Ya	Tidak
38.	Kecamatan Lembor	Ya	Tidak
39.	Kecamatan Lembor Selatan	Ya	Tidak
40.	Kecamatan Kuwus	Ya	Tidak
41.	Kecamatan Kuwus Barat	Ya	Tidak
42.	Kecamatan Ndoso	Ya	Tidak
43.	Kecamatan Welak	Ya	Tidak

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional (jika ada);

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 yang memiliki acuan standar penilaian secara nasional adalah indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Standar Rencana nilai SPBE nasional berdasarkan RPJMN tahun 2020 – 2024 adalah 2,60 indeks. Maka capaian Kabupaten Manggarai Barat melampui target nasional. Adapun standar yang dimaksud adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.12 di bawah ini.

Tabel 3. 12
Perbandingan realisasi indikator kinerja Tahun 2024 dengan target nasional

Indikator Kinerja		Realisasi	Target Nasional	Capaian terhadap target Nasional 2024 (%)
		2024	2024	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,47 Indeks	2,6 Indeks	133,46 %

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Dalam pencapaian indikator kinerja, tentu terdapat faktor – faktor pendukung untuk sebuah keberhasilan atau hal-hal yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

menghambat dalam pelaksanaannya serta langkah – langkah strategis yang dilakukan sebagai alternatif solusi atas permasalahan tersebut. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat serta alternatif solusi atas permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024.

1. Faktor Pendukung Keberhasilan Indikator Kinerja "Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)".

1) Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE, sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki acuan untuk menyelenggarakan SPBE, disamping itu dengan tersedianya dasar hukum juga memudahkan layanan secara daring, aplikasi untuk pelayanan memiliki jangka waktu yang lebih panjang dan lain sebagainya. Kebijakan itu antara lain :

   a. Perbup Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Manggarai Barat yang ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2023;
   b. Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 118/KEP/HK/2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah daearah Kabupaten Manggarai Barat;
   c. Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 205/KEP/HK/2022 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kabupaten Manggarai Barat;
   d. Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 269/KEP/HK/2024 tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
   e. Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 112/KEP/HK/2023 tentang Computer Security Incident Response Team Kabupaten Manggarai Barat (Manggarai Baratkab-Csirt).
   f. Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 282/KEP?HK?2024 tentang Pedoman Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2) Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat memiliki tim khusus untuk menyelenggarakan SPBE. Tim tersebut dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Manggarai Barat dengan rincian sebagai berikut:
   a. Nomor 270 / KEP / HK /2024 tentang TIM Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 30 Juli 2024;
   b. Nomor 200 / KEP / HK /2022 tentang TIM Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang ditetapkan tanggal 10 Juni 2022.
3) Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat membentuk TIM Kolaborasi yang terdiri dari ASN, Non ASN dan Lembaga Perguruan Tinggi dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 269/KEP/HK/2024 tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

2. Faktor Pendukung Keberhasilan Indikator Kinerja "Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi"

1) Sistem layanan publik dan administrasi secara online pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat sudah 85,71% lebih terintegrasi pusat data pemerintah pusat, hal ini tercapai karena komitmen yang kuat dari pimpinan daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk memberikan anggaran yang cukup setiap tahunnya untuk penerapan E-government atau pelayanan publik secara online;
2) Tersedianya peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengatur tata kelola pemerintahan berbasis elektronik sehingga menjadi dasar dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan secara online dan terintegrasi;
3) Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat juga memiliki infrastruktur yang baik untuk menunjang pelayanan publik secara online, seperti jaringan internet yang memadai pada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

masing-masing OPD dan juga memiliki akses penyimpanan data pada Pusat Data Nasional (PDN).

4) Hal penting lainnya yang menunjang peningkatan layanan publik secara online dan terintegrasi yaitu Pemda Kabupaten Manggarai Barat memiliki kualitas Sumber Daya Manusia yang cukup baik pada masing – masing OPD dalam menyelenggarakan pelayanan publik secara online dan terintegrasi.

3. Faktor Pendukung Keberhasilan Indikator Kinerja "Persentase perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan"

1) Partisipasi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyediakan data Statistik Sektoral tahun 2024 yang semakin meningkat;
2) Upaya koordinasi yang baik antara Dinas Kominfo sebagai penyelenggara data statistik sektoral Kabupaten Manggarai Barat dengan OPD penyedia data;
3) BPS Manggarai Barat ikut memberikan rekomendasi dalam upaya peningkatan kualitas data statistik sektoral Kabupaten Manggarai Barat;
4) Komitmen seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan kinerja.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam setiap upaya pencapaian indikator kinerja pastinya didukung oleh sumber daya yang memadai baik itu sumber daya manusia, sumber daya anggaran maupun sarana prasarana pendukung atas program dan kegiatan dimaksud. Untuk mengetahui tingkat efektifitas penggunaan sumber daya, maka perlu dilakukan analisis efisiensi terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan apabila capaian kinerja mencapai 100 % (seratus persen). Berikut ini adalah penjelasan tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 3. 13
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian indikator kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)		% Tingkat Efisiensi
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = 7/8*100%*
Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,35 Indeks	1.446.850.200	3,47 Indeks	1.386.611.579	103,58	95,84	108,36
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	75 %	90.985.200	85,71%	86.750.000	114,28	95,35	119,85
	Persentase perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan Pembangunan	60 %	47.112.200	60,47%	43.778.500	100,77	92,92	108,45
Rata – Rata Efisiensi								112,22

1. Data Efisiensi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Efisiensi penggunaan anggaran dalam sebuah institusi pemerintah yaitu dimana realisasi penggunaan anggaran tidak mencapai 100%, namun capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan tercapai 100% sesuai rencana yang diinginkan. Tabel 3.14 berikut ini yaitu menyajikan perhitungan efisiensi realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024.

Tabel 3. 14
Perhitungan efisiensi Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi (Rp)
1	2	3	4=2-3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**2.724.911.233**	**2.495.212.249**	**229.698.984**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**12.996.600**	**9.737.200**	3.259.400
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.900.000	9.587.200	312.800
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.096.600	150.000	2.946.600
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.414.138.133	2.283.085.999	131.052.134
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.219.886.373	2.111.661.714	108.224.659

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi (Rp)
1	2	3	4=2-3
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	191.742.460	170.054.085	21.688.375
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.509.300	1.370.200	1.139.100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**19.367.400**	**19.066.000**	301.400
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.367.400	19.066.000	301.400
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	-
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**575.600**	**-**	**575.600**
Pendidika dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	575.600	-	575.600
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**163.441.500**	**116.420.900**	47.020.600
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.183.400	6.781.000	1.402.400
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.021.700	14.685.700	5.336.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.059.700	5.250.000	18.809.700
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.090.200	7.562.500	12.527.700
Penyediaan Bahan/Material	9.921.000	4.341.500	5.579.500
Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.068.300	73.000.200	3.068.100
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.097.200	4.800.000	297.200
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**-**	**-**	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**44.492.000**	**18.774.700**	25.717.300
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.492.000	3.048.500	2.443.500
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.000.000	15.726.200	23.273.800
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**69.900.000**	**48.127.450**	21.772.550
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.500.000	42.137.450	13.362.550
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.400.000	5.990.000	8.410.000
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**119.789.600**	**103.287.450**	16.502.150

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi (Rp)
1	2	3	4=2-3
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**119.789.600**	**103.287.450**	16.502.150
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	8.820.000	8.473.500	346.500
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	-	-	-
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	38.936.800	29.164.900	9.771.900
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	-	-	-
Pelayanan Informasi publik	-	-	-
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	72.032.800	65.649.050	6.383.750
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	**1.537.835.400**	**1.473.361.579**	64.473.821
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**1.537.835.400**	**1.473.361.579**	64.473.821
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.379.462.900	1.353.157.034	26.305.866
Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	39.935.200	38.000.000	1.935.200
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	48.000.000	33.092.945	14.907.055
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	51.050.000	48.750.000	2.300.000
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	-	-	-
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	19.387.300	361.600	19.025.700
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	-	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**57.634.800**	**47.456.500**	10.178.300
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**57.634.800**	**47.456.500**	10.178.300
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	30.248.400	27.021.500	3.226.900
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	16.863.800	16.757.000	106.800

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi (Rp)
1	2	3	4=2-3
Membangun Metadata Statistik Sektoral	10.522.600	3.678.000	6.844.600
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan 4 (empat) program, 11 (Sebelas) kegiatan dan 9 (Sembilan) kegiatan sebagai penunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dimaksud adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.15 di bawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 3. 15
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis

Kategori	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Sub Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian %
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*
Program	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**	**Persen**	**75**	**85,71**	**114.28%**
		Persentase layanan administrasi pemerintah yang terintegrasi	**Persen**	**75**	**90,00**	**120,00%**
Kegiatan	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
Sub Kegiatan	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penatalaksanaan dan pengawasan E-Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dok.	1	1	100
Sub Kegiatan	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola	Unit	1	1	100
Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang terlayani akses internet yang memadai Persentase penyelesaian pemeliharaan jaringan internet OPD	OPD	43	42	97,67
Sub Kegiatan	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi SPBE yang online dan teringrasi	Aplikasi	2	2	100
Sub Kegiatan	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan Smart City	Dok.	1	1	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kategori	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Sub Kegiatan	Target		Realisasi	Capaian %
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*
Sub Kegiatan	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dok.	1	1	100
Sub Kegiatan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Indeks	3,35	3,47	103.58
Program	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase PD yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan**	**Persen**	**60**	**60,47**	**100,78**
Kegiatan	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**					
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan	OPD	43	26	58,54
Sub Kegiatan	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	OPD	26	6	23.08
Program	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase aplikasi persandian yang diterapkan dalam SPBE**	**Persen**	**30**	**16,67**	**55,56**
Kegiatan	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**					
Sub Kegiatan	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	OPD	12	2	16,67

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- **Analisis Capaian Indikator Program Aplikasi Informatika**

1. Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online

Realisasi kinerja indikator ini adalah sebesar 85,71 % dari target 75% artinya pencapaian kinerja indikator kinerja Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online adalah melebih target. Pencapaian ini sangat tinggi karena meningkatnya jumlah aplikasi pelayanan publik yang terintegrasi dengan pusat data nasional (PDN) dari tahun sebelumnya 11 aplikasi dan tahun 2024 meningkat menjadi 12 aplikasi dari total aplikasi pelayanan publik 14 aplikasi. Daftar aplikasi pelayanan publik secara online dan terintegrasi Kabupaten Manggarai Barat yang terintegrasi dengan layanan Pusat Data Nasional adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.16 berikut ini.

Tabel 3. 16
Daftar aplikasi Layanan publik yang terintegrasi tahun 2024

No.	Nama Layanan/Alamat Website	Nama Aplikasi	Terintegrasi
1.	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	SP4N LAPOR	Sudah
2.	Layanan Perijinan Non OSS	Mabar Mantap	Sudah
3.	Layanan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (Jdih)	Jdih	Sudah
4.	Layanan Pelayanan Publik	SIPP	Sudah
5.	Layanan Pajak Bumi dan Bangunan	V-Tax	Sudah
6.	Layanan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum - DPRD	Jdih-dprd	Sudah
7.	Layanan Informasi Telekomunikasi	Sistel	Belum
8.	Layanan Kependudukan	SIAK	Sudah
9.	Layanan Perijinan	OSS	Sudah
10.	Layanan Wisata	Wis Mabar	Belum
11.	Layanan Perijinan Khusus Manggarai Barat	Payanan Perijinan Daerah Kabupaten Manggarai Barat	Sudah
12.	Layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	PBB	Sudah
13.	Layanan Informasi Publik	PPID	Sudah
14.	Layanan Data Publik	Satu Data Indonesia Manggarai Barat	Sudah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

$$Rumus = \frac{Jumlah\ Layanan\ Publik\ yang\ diselenggarakan\ secara\ online\ dan\ terintegrasi}{Jumlah\ Layanan\ Publik\ dan\ Layanan\ Administrasi}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{12}{14}\ x\ 100\%$$

$$= 85{,}71\%$$

2. Indikator "Persentase layanan administrasi pemerintah yang terintegrasi",

Realisasi indikator kinerja Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang teintegrasi adalah 70% dari target sebesar 75% atau tingkat capaian 93,33%. Pencapaian ini cukup tinggi karena meningkatnya aplikasi layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi dengan layanan Pusat Data Nasional (PDN), dimana tahun sebelumnya adalah 6 aplikasi dan tahun 2024 7 aplikasi yang terintegrasi. Daftar aplikasi layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi dengan layanan pusat Data Nasional adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.17 di bawah ini.

Tabel 3. 17
Daftar aplikasi layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi tahun 2024

No.	Nama Layanan	Nama Aplikasi	Keterangan
1.	Layanan Perencanaan	SIPD-RI RKPD	Sudah Terintegrasi
2.	Layanan Penganggaran	SIPD-RI Penganggaran	Sudah Terintegrasi
3.	Layanan Keuangan	SIPD Penatausahaan	Sudah Terintegrasi
4.	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	LPSE	Sudah Terintegrasi
5.	Layanan Kepegawaian	SAPK	Sudah Terintegrasi
6.	Layanan Kearsipan	Srikandi	Sudah Terintegrasi
7.	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Simda Aset	Belum Terintegrasi
8.	Layanan Pengawasan Internal Terkait Pemerintahan	WBS	Belum Terintegrasi
9.	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	SAKIP	Belum Terintegrasi
10.	Layanan Kinerja Pegawai	E-kinerja	Sudah Terintegrasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

$$Rumus = \frac{Jumlah\ Layanan\ Administrasi\ Pemerintahan\ yang\ terintegrasi}{Jumlah\ Administrasi\ Pemerintahan}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{7}{10}\ x\ 100\%$$

$$= 70{,}00\%$$

- **Analisis capaian indikator Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Target pengelolaan e-Government pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2024 adalah 24 aplikasi yang terintegrasi, dimana 10 aplikasi untuk pelayanan administrasi pemerintahan dan 14 aplikasi untuk pelayanan publik. Namun jumlah aplikasi yang berhasil diintegrasikan hanya 19 aplikasi atau 79,17%. Sementara itu penyediaan akses internet pada masing – masing OPD sudah mencapai 97,67 % atau 42 OPD dari 43 jumlah OPD secara keseluruhan, artinya hampir seluruh perangkat daerah di Kabupaten Manggarai Barat telah memiliki akses internet untuk penyelenggaraan e-government atau pemerintahan secara elektronik. Di bawah ini adalah data jumlah aplikasi untuk penyelenggaraan e-government di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2023 dan jumlah perangkat daerah yang memiliki akses internet.

Tabel 3. 18
Daftar aplikasi untuk penyelenggaraan e-government Pemda Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024

No.	Nama Layanan	Nama Aplikasi	Keterangan
A.	**Aplikasi Layanan Administrasi Pemerintahan**		
1.	Layanan Perencanaan	SIPD	Sudah Terintegrasi
2.	Layanan Penganggaran	SIPD	Sudah Terintegrasi
3.	Layanan Keuangan	SIMDA	Belum Terintegrasi
4.	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	LPSE	Sudah Terintegrasi
5.	Layanan Kepegawaian	SAPK	Sudah Terintegrasi
6.	Layanan Kearsipan	Srikandi	Sudah Terintegrasi
7.	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Simda Aset	Belum Terintegrasi
8.	Layanan Pengawasan Internal TerkaitPemerintahan	WBS	Belum Terintegrasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Nama Layanan	Nama Aplikasi	Keterangan
9.	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	SAKIP	Belum Terintegrasi
10.	Layanan Kinerja Pegawai	E-kinerja	Sudah Terintegrasi
B.	**Aplikasi Pelayanan Publik secara Online**		
1.	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	SP4N LAPOR	Sudah Terintegrasi
2.	Layanan Perijinan Non OSS	Mabar Mantap	Sudah Terintegrasi
3.	Layanan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (Jdih)	Jdih	Sudah Terintegrasi
4.	Layanan Pelayanan Publik	SIPP	Sudah Terintegrasi
5.	Layanan Pajak Bumi dan Bangunan	V-Tax	Sudah Terintegrasi
6.	Layanan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum - DPRD	Jdih-dprd	Sudah Terintegrasi
7.	Layanan Informasi Telekomunikasi	Sistel	Belum Terintegrasi
8.	Layanan Kependudukan	SIAK	Sudah Terintegrasi
9.	Layanan Perijinan	OSS	Sudah Terintegrasi
10.	Layanan Wisata	Wis Mabar	Belum Terintegrasi
11.	Layanan Perijinan Khusus Manggarai Barat	Payanan Perijinan Daerah Kabupaten Manggarai Barat	Sudah Terintegrasi
12.	Layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	PBB	Sudah Terintegrasi
13.	Layanan Informasi Publik	PPID	Sudah Terintegrasi
14.	Layanan Data Publik	Satu Data Manggarai Barat	Sudah Terintegrasi

Tabel 3.19 dibawah ini adalah data jumlah perangkat daerah di Kabupaten Manggarai Barat yang memiliki akses untuk penyelenggaraan e-government tahun 2024.

Tabel 3. 19
Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akses internet untuk penyelenggaraan e-government tahun 2024

NO	INSTANSI	JARINGAN INTERNET KOMINFO				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
2.	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
3.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					
4.	DINAS KESEHATAN					
5.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	INSTANSI	JARINGAN INTERNET KOMINFO				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
6.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN					
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
8.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
9.	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN					
10.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN					
11.	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI					
12.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
13.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
14.	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM					
15.	INSPEKTORAT KABUPATEN MANGGARAI BARAT					
16.	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KEBUDAYAAN					
17.	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
18.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN					
19.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN					
20.	DINAS PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					
21.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
22.	DINAS PERHUBUNGAN					
23.	BADAN KESBANGPOL					
24.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
25.	SEKRETARIAT DPRD					
26.	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
27.	BADAN PENDAPATAN DAERAH					
28.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
29.	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH					
30.	SEKRETARIAT DAERAH					
31.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOMODO					
32.	KECAMATAN KOMODO					
33.	KECAMATAN SANO NGGOANG					
34.	KECAMATAN MBELILING					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	INSTANSI	JARINGAN INTERNET KOMINFO				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
35.	KECAMATAN LEMBOR					
36.	KECAMATAN LEMBOR SELATAN					
37.	KECAMATAN KUWUS					
38.	KECAMATAN KUWUS BARAT					
39.	KECAMATAN WELAK					
40.	KECAMATAN BOLENG					
41.	KECAMATAN MACANG PACAR					
42.	KECAMATAN NDOSO					
43.	KECAMATAN PACAR					

Persentase jumlah perangkat daerah yang memiliki akses internet untuk penyelenggaraan e-government, dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini:

$$Rumus = \frac{Jumlah\ PD\ yang\ memiliki\ akses\ Internet}{Jumlah\ Seluruh\ Perangkat\ Daerah} x\ 100\%$$

$$= \frac{42}{43} x\ 100\%$$

$$= 97{,}67\ \%$$

- **Analisis Capaian Indikator Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik**

1. Indikator Kinerja "Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)".

   Capaian indikator kinerja Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) adalah bertujuan untuk mengukur jumlah layanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Manggarai Barat melalui website PPID. Jumlah layanan informasi publik yang disajikan oleh Dinas Kominfo tahun 2024 adalah berjumlah 47 informasi dari target 94 informasi pelayanan publik. Berikut ini adalah data informasi publik yang diselenggarakan tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 3. 20
Daftar diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) Tahun 2024

1.

2.

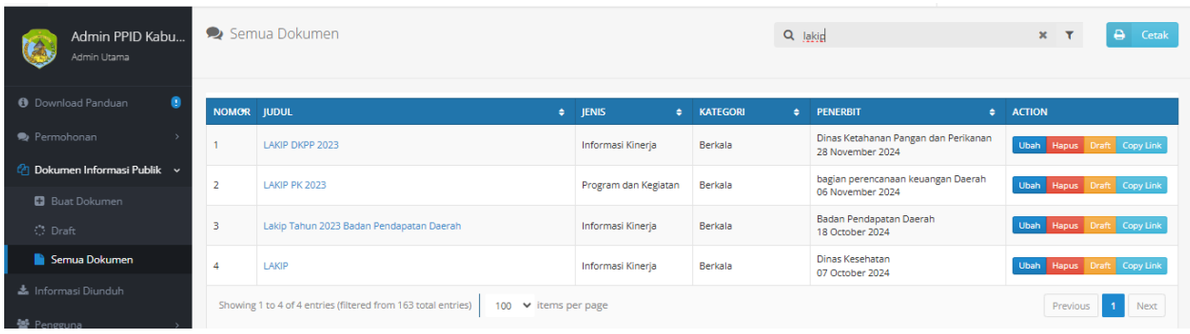

3.

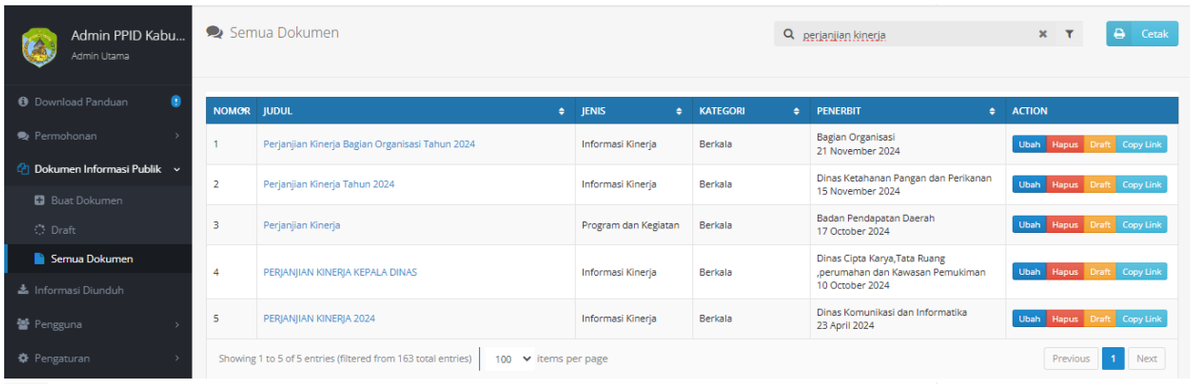

4.

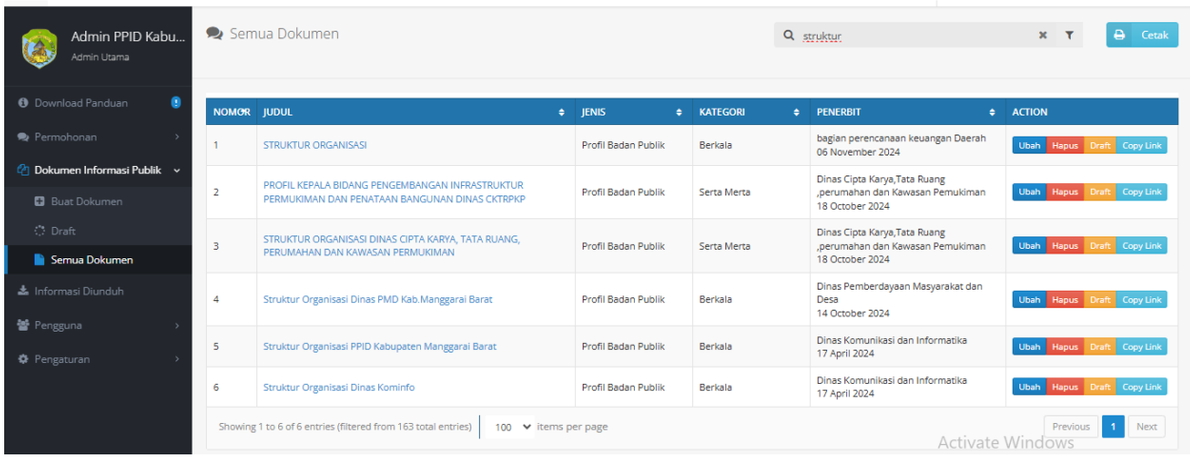

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5.

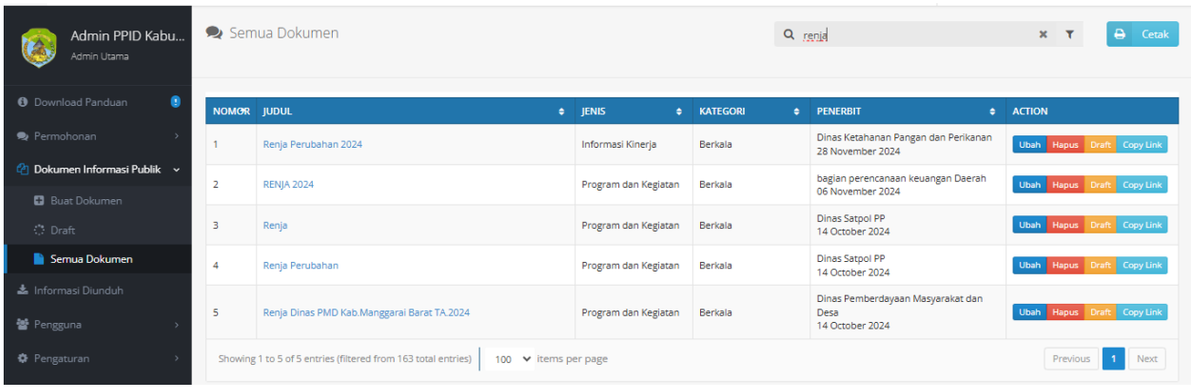

6.

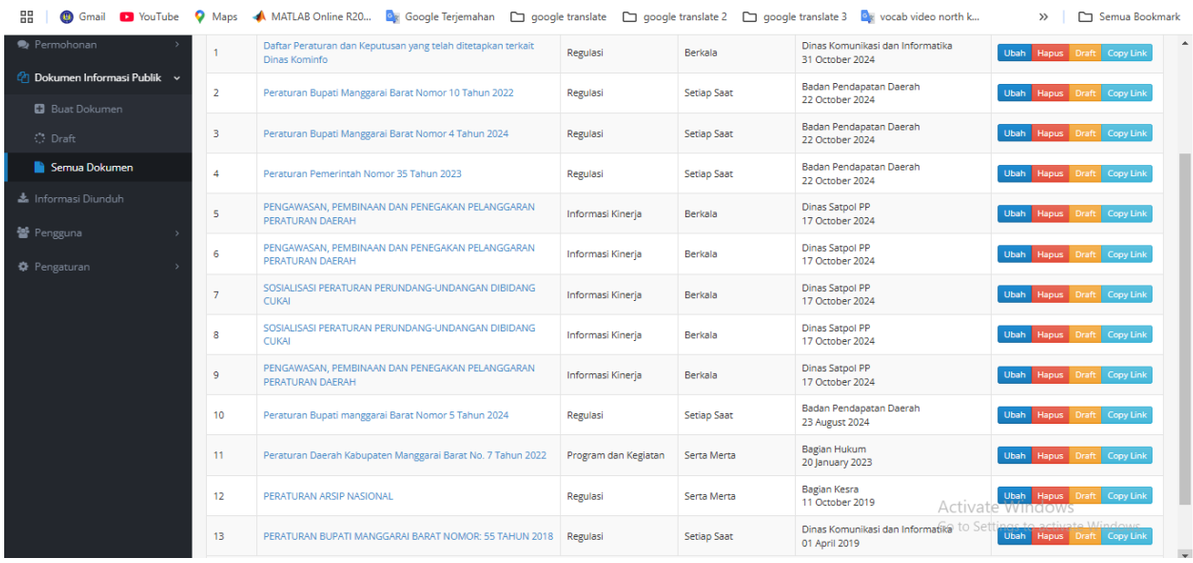

7.

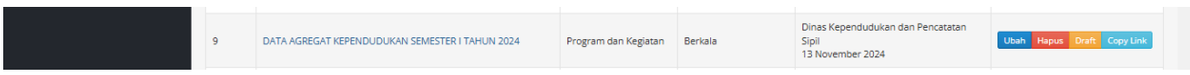

8.

9.

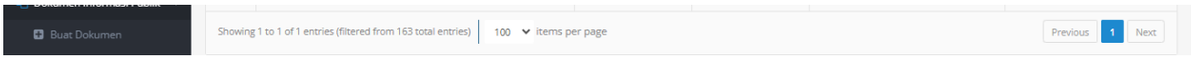

10.

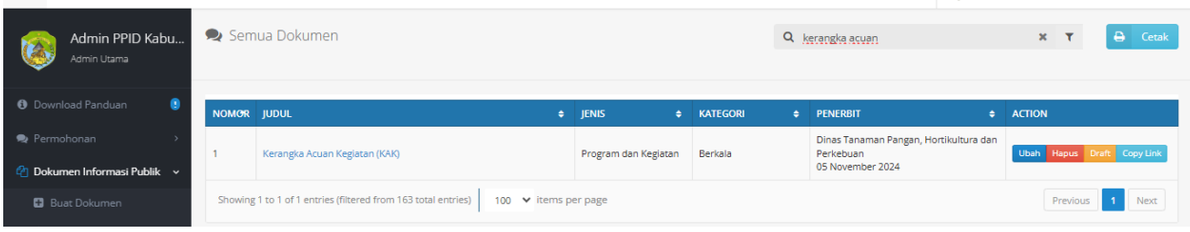

11.

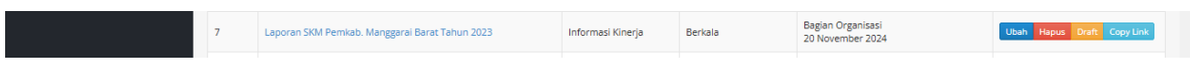

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

12.

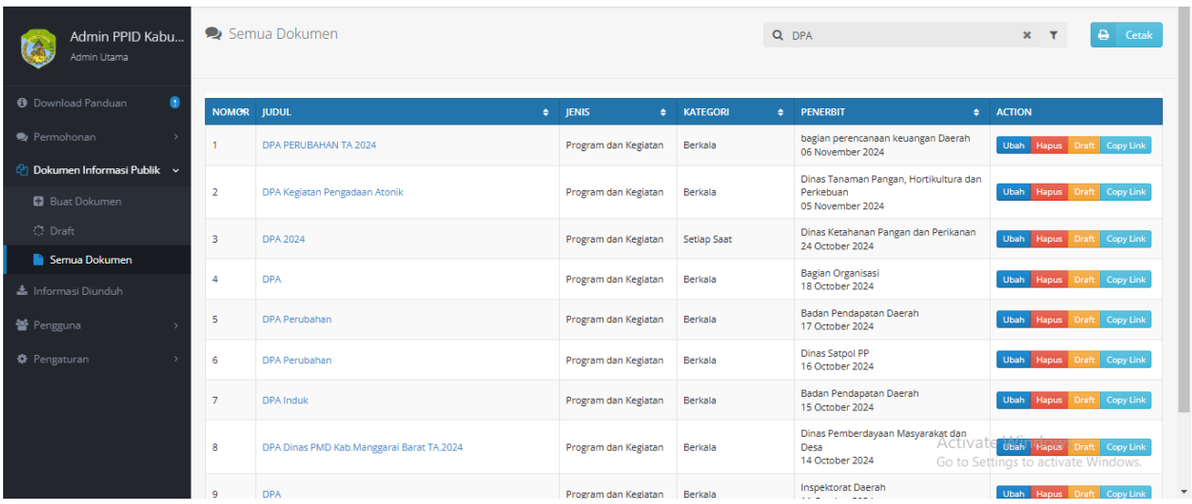

13.

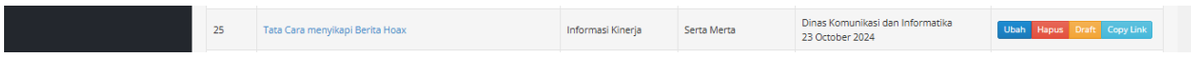

14.

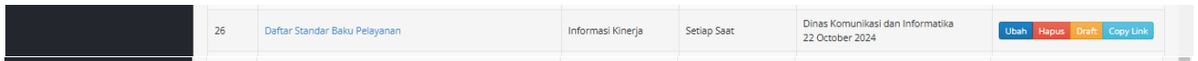

15.

16.

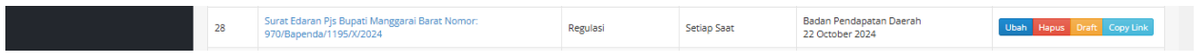

17.

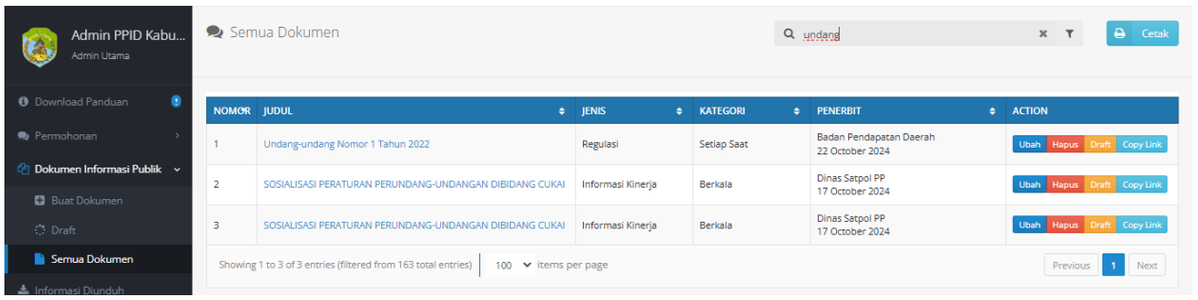

18.

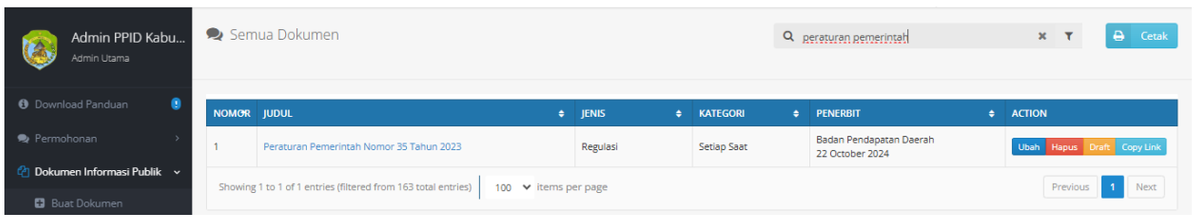

19.

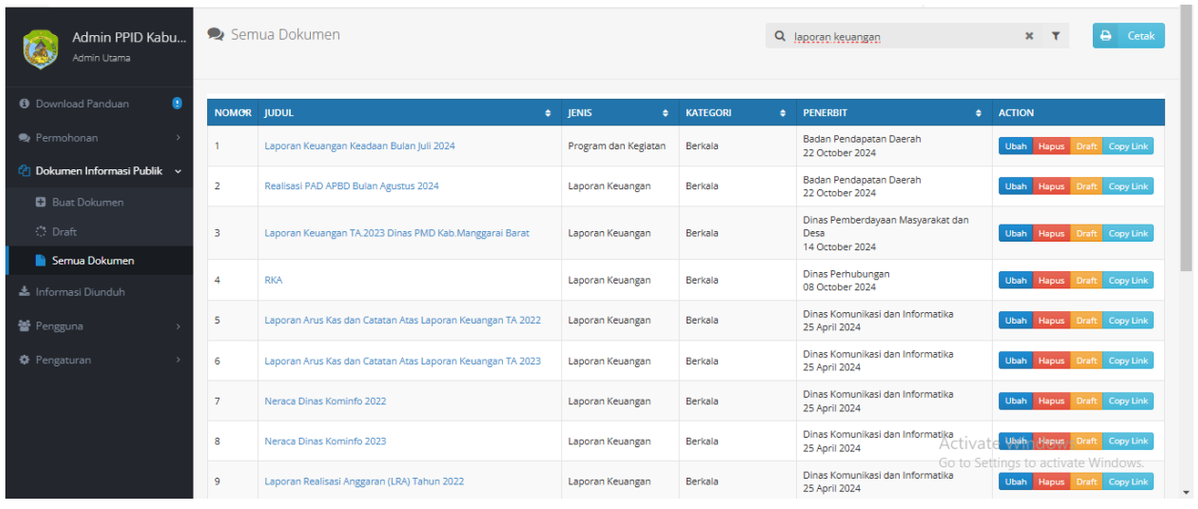

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

20.

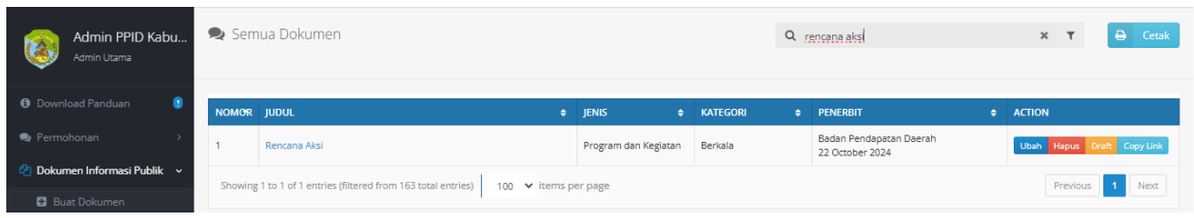

21.

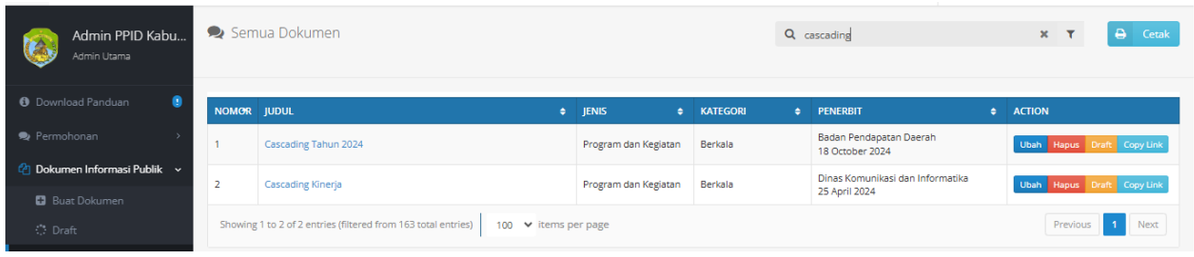

22.

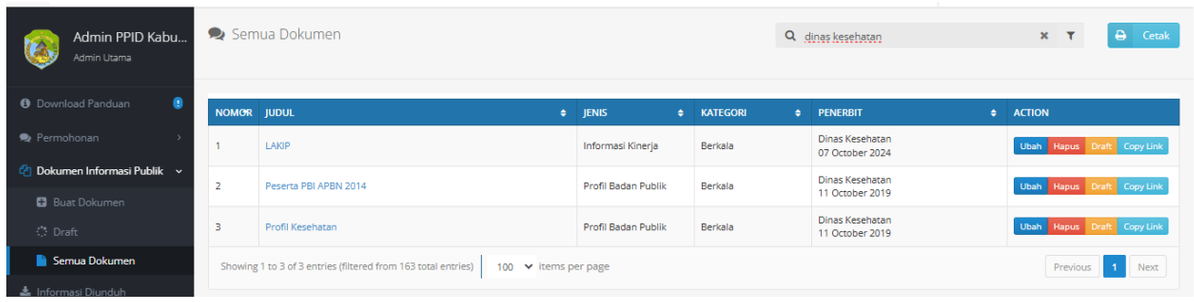

23.

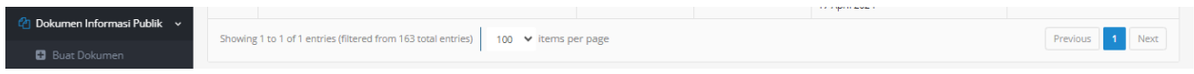

24.

25.

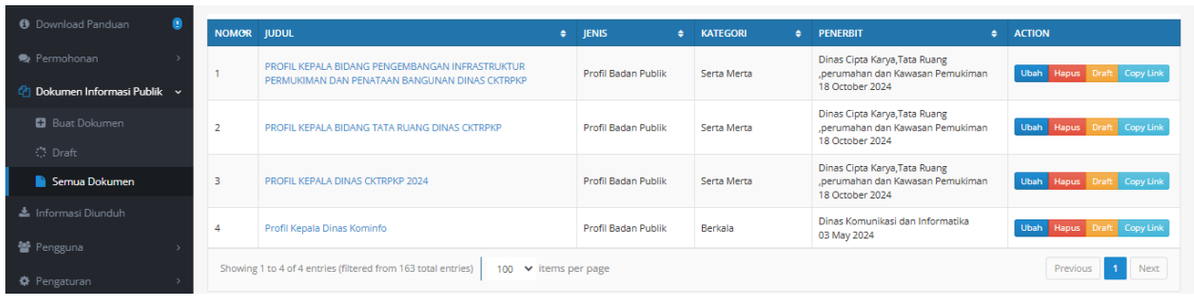

26.

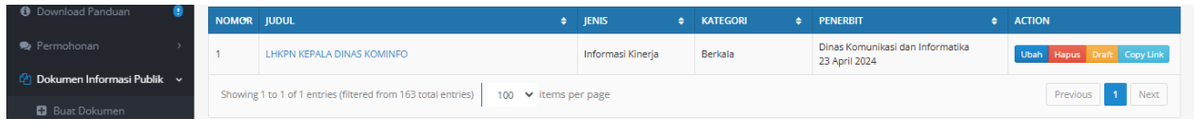

27.

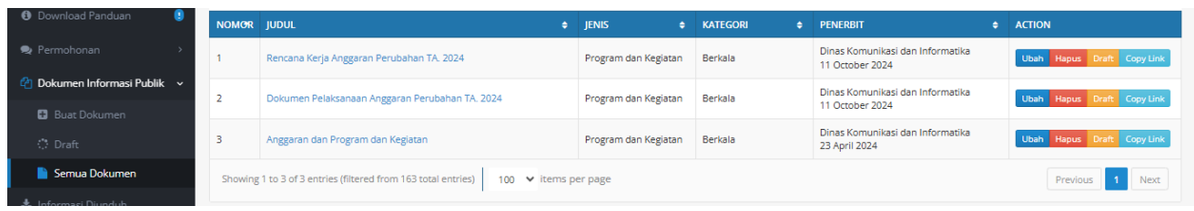

28.

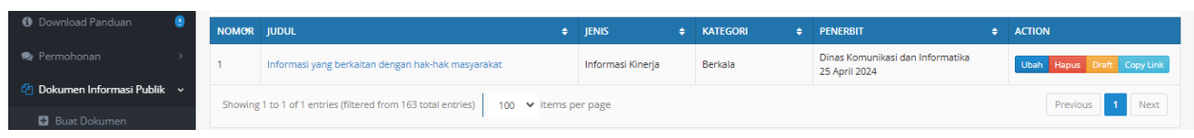

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

29.

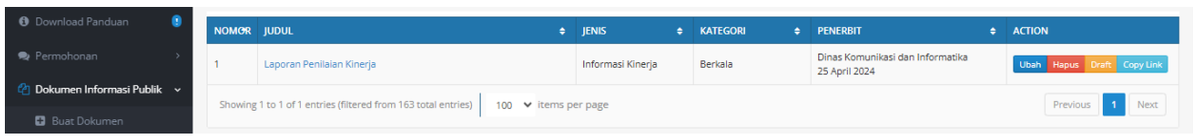

30.

31.

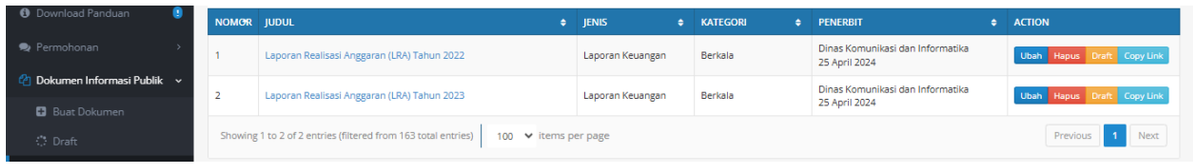

32.

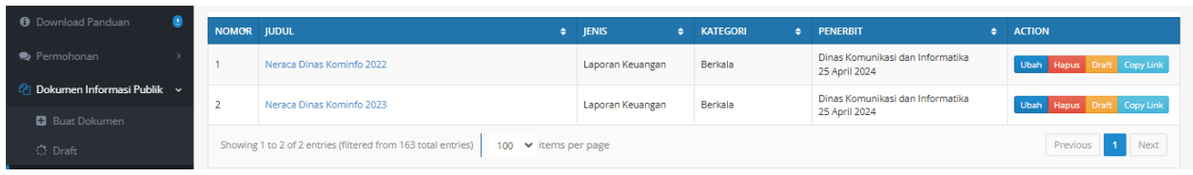

33.

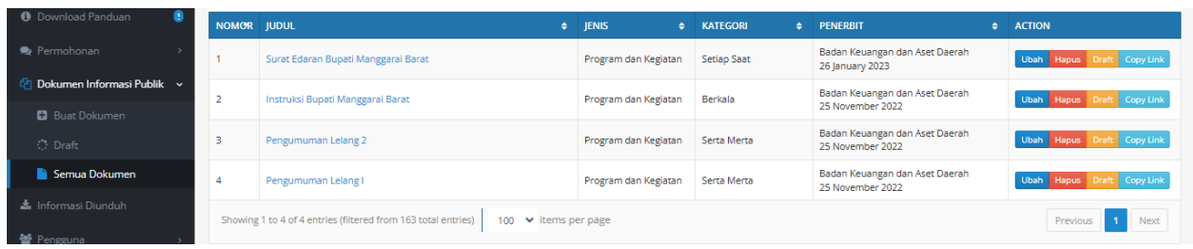

34.

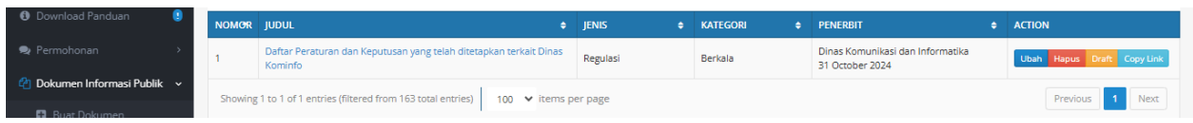

35.

36.

37.

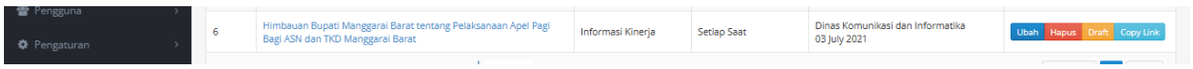

38.

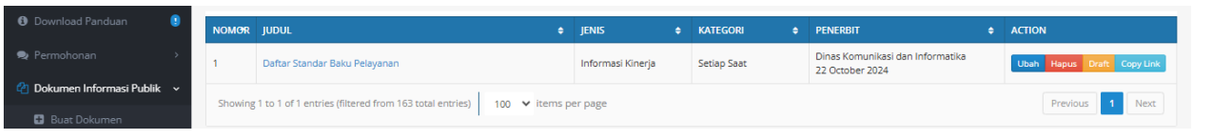

39.

40.

41.

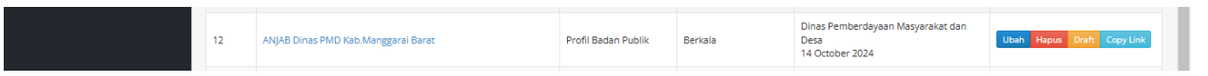

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

42.

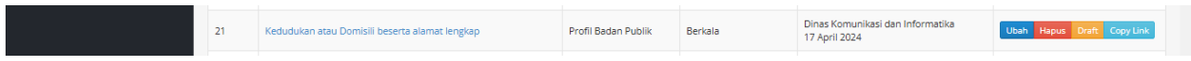

21	Kedudukan atau Domisili beserta alamat lengkap	Profil Badan Publik	Berkala	Dinas Komunikasi dan Informatika 17 April 2024	Ubah Hapus Draft Copy Link

43.

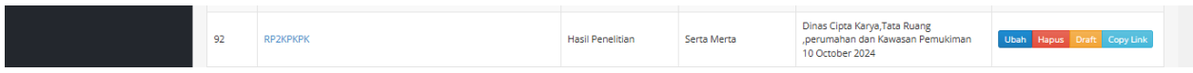

92	RP2KPKPK	Hasil Penelitian	Serta Merta	Dinas Cipta Karya,Tata Ruang ,perumahan dan Kawasan Pemukiman 10 October 2024	Ubah Hapus Draft Copy Link

44.

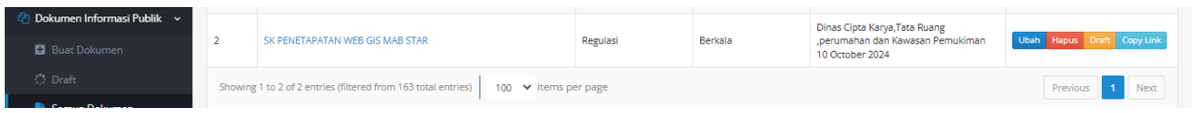

2	SK PENETAPATAN WEB GIS MAB STAR	Regulasi	Berkala	Dinas Cipta Karya,Tata Ruang ,perumahan dan Kawasan Pemukiman 10 October 2024	Ubah Hapus Draft Copy Link

Showing 1 to 2 of 2 entries (filtered from 163 total entries) | 100 items per page | Previous 1 Next

45.

NOMOR	JUDUL	JENIS	KATEGORI	PENERBIT	ACTION
1	Indikator Kerja Utama (IKU) Tahun 2022-2026	Program dan Kegiatan	Berkala	Badan Pendapatan Daerah 18 October 2024	Ubah Hapus Draft Copy Link
2	TUGAS POKOK, FUNGSI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS CKTRPKP	Profil Badan Publik	Serta Merta	Dinas Cipta Karya,Tata Ruang ,perumahan dan Kawasan Pemukiman 18 October 2024	Ubah Hapus Draft Copy Link
3	Indikator Kinerja Utama	Program dan Kegiatan	Berkala	Dinas Komunikasi dan Informatika 25 April 2024	Ubah Hapus Draft Copy Link

Showing 1 to 3 of 3 entries (filtered from 163 total entries) | 100 items per page | Previous 1 Next

46.

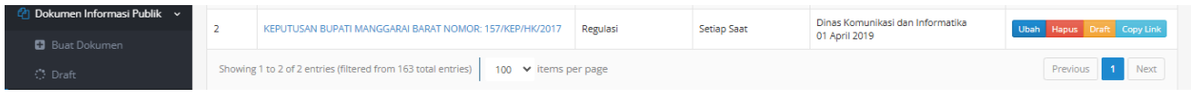

2	KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR: 157/KEP/HK/2017	Regulasi	Setiap Saat	Dinas Komunikasi dan Informatika 01 April 2019	Ubah Hapus Draft Copy Link

Showing 1 to 2 of 2 entries (filtered from 163 total entries) | 100 items per page | Previous 1 Next

47.

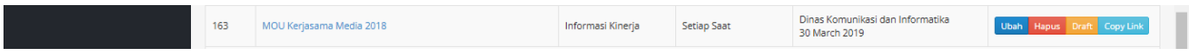

163	MOU Kerjasama Media 2018	Informasi Kinerja	Setiap Saat	Dinas Komunikasi dan Informatika 30 March 2019	Ubah Hapus Draft Copy Link

Berikut adalah rumus perhitungan persentase capaian indikator Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)

$$Rumus = \frac{Diseminasi\ dan\ layanan\ informasi\ publik\ yang\ dilaksanakan\ sesuai\ dengan\ strategi\ komunikasi\ (STRAKOM) dan\ SOP}{Diseminasi\ dan\ layanan\ informasi\ publik} x\ 100\%$$

$$= \frac{47}{94} x\ 100\%$$

$$= 50\ \%$$

2. Indikator Kinerja Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah

Target komunitas masyarakat/mitra strategis Pemda Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka menyebarkan informasi dan kebijakan Pemda adalah 60 komunitas, namun realisasi adalah 55 Komunitas atau persentase capaian 91,67%. Pemanfaatan komunitas masyarakat/mitra dalam penyebaran informasi pembangunan daerah bertujuan agar penyebaran informasi pembangunan daerah Kabupaten Manggarai Barat menjadi lebih massif dan lebih cepat diketahui oleh masyarakat. Tabel 3.21 di bawah adalah daftar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

komunitas masyarakat/mitra komunikasi Pemda untuk penyebaran informasi pembangunan.

Tabel 3. 21
Daftar komunitas masyarakat/mitra komunikasi Pemda Kabupaten Manggarai Barat

No.	Mitra Komunikasi	Menyebarkan informasidan kebijakan Pemerintah
1.	KIM Kelurahan Nantal Kec. Kuwus	Ya
2.	KIM Desa Tentang Kec. Ndoso	Ya
3.	KIM Desa Golo Mbu Kec. Sano Nggoang	Ya
4.	KIM Desa Orong Kec. Welak	Ya
5.	KIM Kelurahan Tangge Kec. Lembor	Ya
6.	KIM Desa Tengku Kec. Kuwus Barat	Ya
7.	KIM Desa Cunca Wulang Kec. Mbeliling	Ya
8.	KIM Desa Wae Mose Kec. Lembor Selatan	Ya
9.	KIM Desa Mbuit Kec. Boleng	Ya
10.	KIM Desa Pantar Kec. Komodo	Ya
11.	KIM Desa Siru Kec. Lembor	Ya
12.	KIM Desa Ranggu Kec. Kuwus barat	Ya
13.	KIM Desa Pasir Putih Kec. Komodo	Ya
14.	KIM Desa Wontong Kec. Macang Pacar	Ya
15.	KIM Desa Compang Kec. Pacar	Ya
16.	Pos Kupang	Ya
17.	Tribun Flores	Ya
18.	Flores Pos	Ya
19.	NTT Pembaharuan	Ya
20.	Jurnal Flores	Ya
21.	VoxNTT.com	Ya
22.	Kliklabuanbajo.id	Ya
23.	Detikflores.com	Ya
24.	Postntt.com	Ya
25.	Antara.com	Ya
26.	Kitaindonesia.com	Ya
27.	Wartanusantara.com	Ya
28.	Nttpembaharuan.com	Ya
29.	Florescreative.com	Tidak
30.	Florespos.com	Ya
31.	Flores editorial.com	Ya
32.	Floresnews.com	Ya
33.	Floresku.com	Ya
34.	Sorotntt.com	Ya
35.	Kabarntt.com	Ya
36.	Patrolipost.com	Ya
37.	Policenews.com	Ya
38.	Jurnalbali.com	Ya
39.	RSPD	Ya
40.	TVRI	Ya
41.	AFB TV	Ya
42.	Info Publik	Ya
43.	Padamunegeri.com	Ya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Mitra Komunikasi	Menyebarkan informasidan kebijakan Pemerintah
44.	RRI Cabang Ende	Ya
45.	Timex.com	Tidak
46.	Actual.com	Tidak
47.	Matanews.com	Tidak
48.	Victorynews.com	Ya
49.	Ekora.com	Tidak
50.	Info Labuan Bajo	Ya
51.	Journalpost.id	Ya
52.	Att.viva.co.id	Ya
53.	Tajuh Flores	Ya
54.	Kompas.com	Ya
55.	Okebajo.com	Ya
56.	Telisik.co.id	Ya
57.	Metrotv	Ya
58.	Tvone	Ya
59.	Media Indonesia	Ya
60.	BeritasatuTV	Ya

Formula perhitungan persentase jumlah komunitas masyarakat/mitra komunikasi Pemda

$$Rumus = \frac{Komunitas\ masyarakat\ atau\ mitra\ strategis\ pemerintah\ daerah\ Kabupaten\ yang\ telah\ menyebarkan\ informasi\ dan\ kebijakan\ pemerintah}{Komunitas\ masyarakat\ atau\ mitra\ komunikasi\ pemerintah\ daerah\ Kabupaten} x\ 100\%$$

$$= \frac{55}{60} x\ 100\ \%$$

$$= 91{,}67\ \%$$

- **Analisis capaian indikator Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

  Dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan dan mengembangkan informasi, maka pemerintahan daerah sebagai perpanjangan pemerintah pusat, perlu menyelenggarakan pengelolaan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang - Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf f. Capaian Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024 yaitu 100 %. Capaian yang tinggi ini disebabkan karena pengelolaan konten informasi yang meningkat dimana tahun sebelumnya 1159 informasi mencapai 1329 informasi dari target 1329 informasi. Dibawah ini adalah beberapa konten informasi yang telah dipublikasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

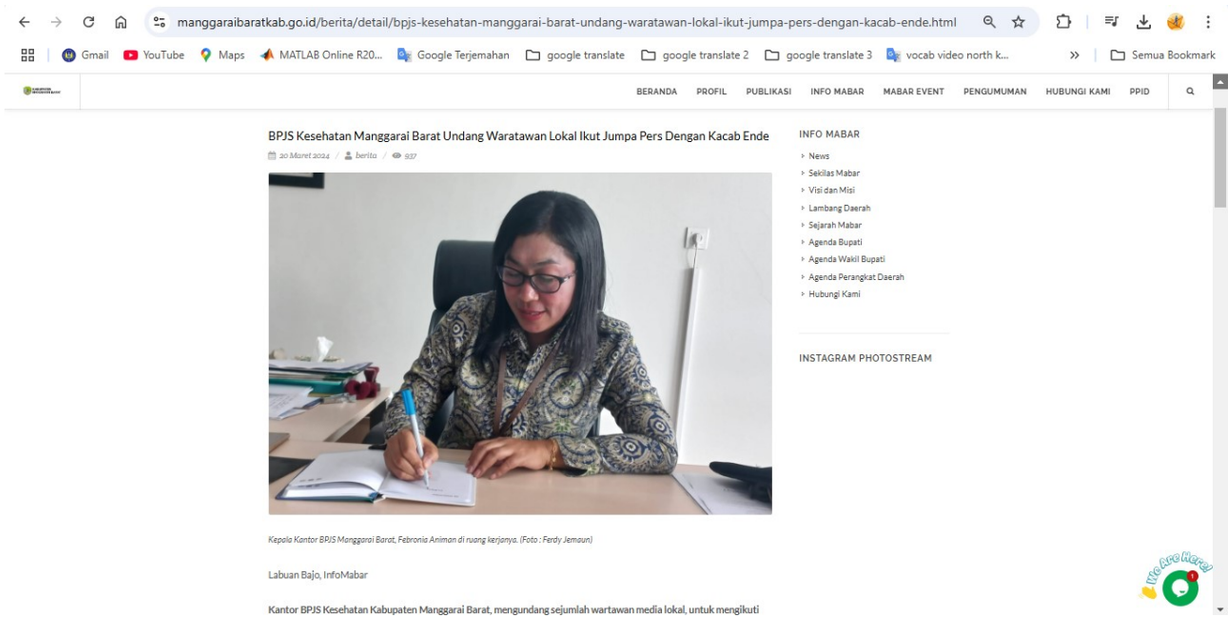

Berita yang disebarkan melalui website Pemda Kabupaten Manggarai Barat (www.manggaraibaratkab.go.id) dengan Judul "BPJS Kesehatan Manggarai Barat Undang Waratawan Lokal Ikut Jumpa Pers Dengan Kacab Ende".

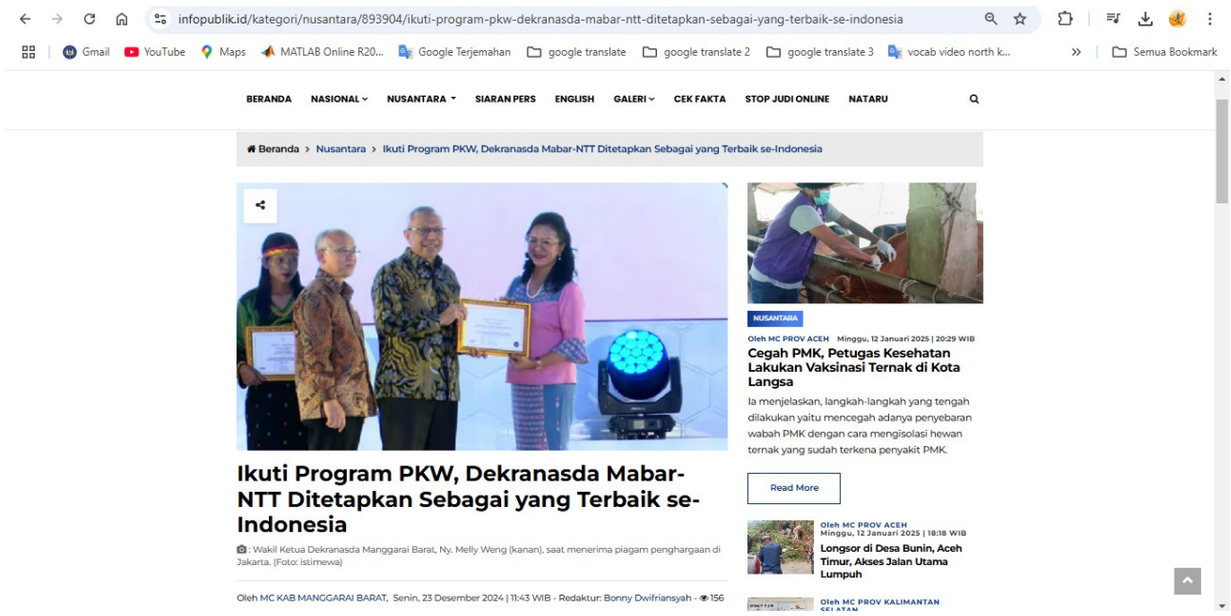

Berita yang disebarkan melalui media Infopublik dengan judul "Ikuti Program PKW, Dekranasda Mabar-NTT Ditetapkan Sebagai yang Terbaik se-Indonesia".

- **Analisis Capaian Indikator Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

  Indikator kinerja "Persentase OPD yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan". Tolok ukur indikator kinerja ini adalah jumlah perangkat daerah yang mengumpulkan data statistik sektoral. Target Perangkat Daerah yang mengumpulkan data statistik sektoral tahun 2024 adalah 26 OPD atau 60% dari total jumlah OPD Kabupaten

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Manggarai Barat, dan realisasi atas kinerja adalah 26 OPD, sehingga persentase capaian kinerja adalah 100% dengan tingkat capaian 100,00%. Hasil yang positif ini disebabkan karena semakin meningkatnya perangkat daerah yang menyediakan data statistik sektoral. Tabel 3.22 di bawah ini adalah data jumlah OPD yang menyajikan data statistik sektoral lengkap tahun 2024.

Tabel 3. 22
Daftar OPD yang menyajikan data statistik sektoral lengkap tahun 2024

NO	Nama OPD	Wajib Data Sektoral	Mengirimkan Data Sektroral
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ya	Ya
2.	Dinas Kesehatan	Ya	Ya
3.	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	Ya	Ya
4.	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ya	Ya
5.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Ya	Ya
6.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura danPerkebunan	Ya	Ya
7.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ya	Ya
8.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Ya	Ya
9.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ya	Ya
10.	Dinas kependidikan Kepemudaan dan Olahraga	Ya	Ya
11.	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	Ya	Ya
12.	Satuan Polisi Pamong Praja	Ya	Tidak
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Ya	Ya
14.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Ya	Ya
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu	Ya	Ya
16.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Ya	Ya
17.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	Ya	Ya
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ya	Ya
19.	Dinas Pengendalian Penduduk dan	Ya	Ya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	Nama OPD	Wajib Data Sektoral	Mengirimkan Data Sektroral
	Keluarga Berencana		
20.	Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat	Ya	Ya
21.	Dinas Perhubungan	Ya	Ya
22.	Sekretariat DPRD	Ya	Ya
23.	Sekretariat Daerah	Ya	Tidak
24.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Ya	Ya
25.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ya	Ya
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ya	Ya
27.	Badan Pendapatan Daerah	Ya	Ya
28.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ya	Tidak
29.	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	Ya	Ya
30.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Ya	Tidak
31.	Rumah Sakit Umum Daerah	Ya	Tidak
32.	Kecamatan Komodo	Ya	Tidak
33.	Kecamatan Mbeliling	Ya	Tidak
34.	Kecamatan Sanonggoang	Ya	Tidak
35.	Kecamatan Boleng	Ya	Tidak
36.	Kecamatan Pacar	Ya	Tidak
37.	Kecamatan Macang Pacar	Ya	Tidak
38.	Kecamatan Lembor	Ya	Tidak
39.	Kecamatan Lembor Selatan	Ya	Tidak
40.	Kecamatan Kuwus	Ya	Tidak
41.	Kecamatan Kuwus Barat	Ya	Tidak
42.	Kecamatan Ndoso	Ya	Tidak
43.	Kecamatan Welak	Ya	Tidak

Berikut ini adalah formula penghitungan persentase jumlah OPD yang menyajikan data statistik sektoral lengkap.

$$Rumus = \frac{Jumlah\ OPD\ yang\ menyajikan\ data\ statistik\ secara\ lengkap}{Jumlah\ OPD} x\ 100\%$$

$$= \frac{26}{43} x\ 100\ \%$$

$$= 60{,}47\ \%$$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- **Analisis Capaian Indikator Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**

Statistik sektoral merupakan data pembangunan yang berisfat numerik yang bermanfaat untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Indikator kinerja kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota adalah "Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Statistik di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota". Target indikator ini pada tahun 2024 adalah 3 dokumen dan terealisasi 3 dokumen, sehingga output kinerja adalah 100%. Adapun dokumen yang dimaksud pada output kinerja indikator adalah sebagai berikut.

1. Buku Manggarai Barat dalam angka tahun 2023
2. Buku PDRB kabupaten Manggarai Barat
3. Buku statistik sektoral Kabupaten Manggarai Barat

- **Analisis Capaian Indikator Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

Indikator kinerja "Persentase aplikasi persandian yang diterapkan dalam SPBE", terealisasi sebesar 16,67% dari target 30% atau persentase capaian sebesar 55,57%. Capaian indikator ini didukung oleh terlaksananya pengamanan informasi pada aplikasi SPBE dengan menggunakan kode persandian. Adapun rumus perhitungan persentase realisasi adalah seperti berikut ini, sedangkan data aplikasi SPBE yang menggunakan kode persandian adalah disajikan pada tabel 3.23.

$$Rumus = \frac{Jumlah\ aplikasi\ persandian\ yang\ diterapkan\ dalam\ aplikasi\ SPBE}{Jumlah\ aplikasi\ persandian\ yang\ ada}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{2}{12}\ x\ 100\%$$

$$= 16{,}67\%$$

Tabel 3. 23
Daftar Aplikasi persandian yang diterapkan dalam aplikasi SPBE

No.	Layanan Sesuai Proses Bisnis	Nama Layanan		Nama Aplikasi	Diterapkan dalam SPBE
1.	Layanan Publik Berbasis Elektronik	1.	Layanan Kependudukan	SIAK	Sudah
		2.	Layanan Pajak PBB online	V-Tax	Sudah
		3.	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	SP4N LAPOR	Belum
		4.	Layanan Data Terbuka	Satu Data	Belum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Layanan Sesuai Proses Bisnis	Nama Layanan		Nama Aplikasi	Diterapkan dalam SPBE
		5.	Layanan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (Jdih)	Jdih	Belum
		6.	Layanan Pelayanan Publik	SIPP	Belum
		7.	Layanan Pajak	Pajak	Belum
		8.	Layanan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum - DPRD	Jdih-dprd	Belum
		9.	Layanan Informasi Telekomunikasi	Sistel	Belum
2.	Layanan Administrasi Pembangunan	10.	Layanan Kepegawaian	SAPK	Belum
		11.	Layanan Kearsipan	Srikandi	Belum
		12.	Layanan Kinerja Pegawai	E-kinerja	Belum

- **Analisis Capaian Indikator kegiatan penunjang indikator sasaran strategis**

Indikator kegiatan penunjang indikator sasaran strategis ini bertujuan untuk menunjang tercapainya sasaran strategis Perangkat Daerah yang umum adalah kegiatan rutin pada bidang sekretariat. Berikut ini adalah capaian kinerja kegiatan penunjang sasaran strategis perangkat daerah.

Tabel 3. 24
Daftar capaian kinerja kegiatan penunjang sasaran strategis Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
1.	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100
2.	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100
3.	Jumlah Laporan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100
5.	Jumlah Laporan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100
6.	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
7.	Jumlah Laporan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 Laporan	1 Laporan	100
8.	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang terpelihara	1 Laporan	1 Laporan	100

3.2. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang hendak dicapai, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat menganggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manggarai Barat melalui DPA dan DPA-Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. **4.440.171.033,**- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. **4.119.317.778**,- atau dengan serapan dana APBD mencapai **92,77%.**

Karena adanya perlambatan pendapatan asli daerah tahun 2024 sehingga membuat persediaan anggaran pada tahun berjalan tidak cukup memadai, maka pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat melakukan *refocusing* anggaran dan perubahan target kinerja kegiatan. Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang di-*refocusing* oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka efisiensi penganggaran di Tahun 2024, yaitu:

1. Melakukan penjadwalan ulang kegiatan dan memprioritaskan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Renstra dan PK;
2. Bekerja sama dengan provider yang dapat menyediakan jaringan fiber optik yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat meminimalkan penggunaan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jaringan fiber optik.

Setelah dilakukan analisis capaian kinerja yang mengemukakan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, maka analisis akuntabilitas keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat selama Tahun 2024 dapat diuraikan pada tabel 3.25 berikut ini:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 3. 25
Analisis Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Formula Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Triwulan IV)				Keterangan
1	2	3	4		5				6
			K	Rp	K	%	Rp	%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**2.724.911.233**			**2.495.212.249**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Dok**	**13**	**12.996.600**	13	100	**9.737.200**	**74,92%**	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	6	9.900.000	6	100	9.587.200	96,84%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok.	7	3.096.600	7	100	150.000	4,84%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dok & Lap	26 & 15	**2.414.138.133**	**26 & 15**	**100**	**2.283.085.999**	**94,57%**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK	Dok	14	2.219.886.373	14	100	2.111.661.714	95,12%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok.	12	191.742.460	12	100	170.054.085	88,69%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	15	2.509.300	15	100	1.370.200	54,60%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Formula Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Triwulan IV)				Keterangan
1	2	3	4		5				6
			K	Rp	K	%	Rp	%	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Dok.**	**1**	**19.367.400**	**1**	**100**	**19.066.000**	98,44%	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dok.	1	19.367.400	1	100	19.066.000	98,44%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Dok	-						
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dok.	-	-	-	-	-	-	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**OK**	**3**	**575.600**	0	0	-	0,00%	
Pendidika dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	OK	3	575.600	0	0	-	0,00%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Dok**	**2**	**163.441.500**	**2**	**100**	**116.420.900**	**71,23%**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	8.183.400	1	100	6.781.000	82,86%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.021.700	1	100	14.685.700	73,35%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	24.059.700	1	100	5.250.000	21,82%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Formula Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Triwulan IV)				Keterangan
1	2	3	4		5				6
			K	Rp	K	%	Rp	%	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	20.090.200	1	100	7.562.500	37,64%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	9.921.000	1	100	4.341.500	43,76%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lap.	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap.	25	76.068.300	23	92	73.000.200	95,97%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dok.	1	5.097.200	1	100	4.800.000	94,17%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	Pengadaan tidak terealisasi sesuai perencanaan karena anggaran direfocussing
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Unit	-	-	-	-	-	-	Pengadaan tidak terealisasi sesuai perencanaan karena anggaran direfocussing

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Formula Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Triwulan IV)				Keterangan
1	2	3	4		5				6
			K	Rp	K	%	Rp	%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Dok**	**1**	**44.492.000**	**1**	**100**	**18.774.700**	42,20%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap.	1	5.492.000	1	100	3.048.500	55,51%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap.	1	39.000.000	1	100	15.726.200	40,32%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Dok**	**1**	**69.900.000**	**1**	**100**	**48.127.450**	**68,85%**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	55.500.000	14	100	42.137.450	75,92%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	14.400.000	6	60	5.990.000	41,60%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				**119.789.600**			**103.287.450**		
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		**%**	**100**	**119.789.600**	**100**	**100**	**103.287.450**	**86,22%**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Formula Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Triwulan IV)				Keterangan
1	2	3	4		5				6
			K	Rp	K	%	Rp	%	
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dok.	2	8.820.000	2	100	8.820.000	96,07%	Hasil kegiatan tidak mencapai target karena anggaran direfocussing
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dok.	-	-	0	0	-	0	Kegiatan tidak terlaksana karena anggaran direfocussing
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dok.	1	38.936.800	1	100	29.164.900	74,90%	Kegiatan terlaksana sesuai perencanaan
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dok.	-	-	-	-	-	-	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
Pelayanan Informasi publik	Jumlah Dokumen hasil Pelayanan Informasi Publik	Dok.	-	-	-	-	-	-	Kegiatan tidak terlaksana karena anggaran direfocussing
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan"	Dok.	1	72.032.800	1	100	65.649.050	91,14%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				**1.537.835.400**			**1.473.361.579**		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Formula Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Triwulan IV)				Keterangan
1	2	3	4		5				6
			K	Rp	K	%	Rp	%	
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		%	**100**	**1.537.835.400**	100	100	**1.473.361.579**	95,81%	
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penatalaksanaan dan pengawasan E-Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dok.	1	1.379.462.900	1	100	1.353.157.034	98,09%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola	Unit	1	39.935.200	1	100	38.000.000	95,15%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dok.	1	48.000.000	1	100	33.092.945	68,94%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Aplikasi	2	51.050.000	2	100	48.750.000	95,49%	Kegiatan terlaksana sesuai Perencanaan
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Master Plan Smart City	Dok.	1	19.387.300	1	100	361.600	1,87%	Kegiatan terlaksana sesuai Perencanaan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Dok.	-	-	-	-	-	-	Kegiatan terlaksana sesuai target

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Formula Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Triwulan IV)				Keterangan
1	2	3	4		5				6
			K	Rp	K	%	Rp	%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				**57.634.800**			**47.456.500**		
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		**Dok**	**1**	**57.634.800**	**1**	**100**	**47.456.500**	**82,34%**	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dok	3	30.248.400	3	100	27.021.500	89,33%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	OK	5	16.863.800	5	100	16.757.000	99,37%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dok	1	10.522.600	1	100	3.678.000	34,95%	Kegiatan terlaksana sesuai kebutuhan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

1. Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat telah menetapkan satu sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan tiga indikator kinerja utama. Dalam melakukan analisa dan evaluasi atas indikator kinerja tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat melaksanakannya berdasarkan urusan Komunikasi dan Informasi, urusan Statistik dan urusan Persandian. Dari 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan tersebut, rata-rata capaian masing-masing indikator adalah 106,21% atau melebihi target 100% dengan capaian tertinggi adalah indikator kinerja "Persentase Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi" dengan tingkat capaian 114,28%. Hasil capaian indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 dapat kami sajikan seperti tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4. 1
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,35 Indeks	3,47 Indeks	103,58%
		Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	75 %	85,71%	114,28%
		Persentase perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan	60%	60,47%	100,78%
Rata-rata capaian indikator kinerja					106,21%

2. Berdasarkan penjelasan pada Bab III tentang akuntabilitas keuangan, bahwa rata-rata penyerapan keuangan dari 3 (tiga) indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat tahun 2024 yaitu sebesar 91,76%, dengan capaian tertinggi yaitu indikator Persentase perangkat daerah yang memiliki data

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan sebesar 100% sedangkan penyerapan terendah adalah indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 95,49%.

4.2. SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka ada beberapa saran-saran terkait dengan proses penyusunan LAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat antara lain:

1. Mengevaluasi target capaian kinerja dan penyesuaian anggaran terhadap kegiatan.
2. Melakukan efisiensi dengan anggaran dan target untuk mencapai kinerja yang baik.
3. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran, indikator kinerja sehingga nantinya akan tercapai visi misi yang telah ditetapkan.
4. Perlu ditingkatkan kerjasama lintas sektoral maupun dengan *stakeholder* yang ada, demi kemajuan di sektor Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian yang pada akhirnya akan mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Manggarai Barat dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat serta dapat mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Labuan Bajo, 15 Januari 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Manggarai Barat,

Paulus Setahu, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 196806292000121004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara